



LAPORAN EVALUASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIAT TPB PROVINSI SULAWESI SELATAN

**LAPORAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



We support the Sustainable Development Goal



KATA PENGANTAR



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di berbagai level pemerintahan, mulai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota. Untuk itu perumusan untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tingkat Provinsi bersama Pemerintah Kab/ Kota dengan melibatkan unsur terkait, mulai dari Akademisi, Media, Pelaku Usaha, LSM, Filantropi hingga kaum millenials. Berbagai rencana tersebut akan mencakup tujuan, target dan indikator, serta program.

Sulawesi Selatan dalam peranannya dalam Pembangunan Berkelanjutan diharapkan memberikan impact yang nyata, sejumlah kebijakan yang telah kami tempuh utamanya pada bidang kesehatan melalui program pembangunan Rumah Sakit Regional Lamapappenning diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat utamanya untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Anak yang masih cukup tinggi. Kemudian Program ARSINUM (Air Siap Minum) di Daerah Pesisir dan Kepulauan yaitu pengadaan Alat filtrasi air laut menjadi air yang siap digunakan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun rumah tangga. Melalui program tersebut menjadi isyarat bahwa Pemerintah harus hadir dan memahami dengan serius setiap kebutuhan dari masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk menunjang kebutuhan dasar dari masyarakat.

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini memuat berbagai pencapaian target TPB/SDGs yang berhasil ditorehkan pemerintah bersama dengan seluruh aktor nonpemerintah, khususnya yang berada di dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam percepatan pencapaian target TPB mulai dari Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan serta pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan dengan itu, untuk memastikan bahwa target-target yang telah dan akan ditetapkan secara nasional dapat diimplementasikan di daerah dengan tingkat deviasi sekecil mungkin, maka perencanaan program/kegiatan harus disusun secara sistematis dan berkualitas. Untuk itu melalui dokumen ini diharapkan menjadi pertimbangan evaluasi untuk suatu rumusan yang lebih efektif dalam upaya penyelarasan antara target-target nasional dan target-target daerah, dimana kita sadari bahwa target nasional hanya bisa dicapai melalui kontribusi daerah. Sebaliknya target-target daerah tentulah tidak dapat dicapai oleh Daerah sendiri tanpa adanya bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Laporan ini memuat hasil evaluasi atas pencapaian target dari 193 indikator TPB/SDGs serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian target tersebut, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun non pemerintah. Evaluasi ini didasarkan pada target pencapaian indikator serta kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin.

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**



DAFTAR ISI

1.1.	Latar Belakang	5
1.2.	Metodologi Penyusunan Laporan	7
1.3.	Sistematika Pelaporan	7
2.1.	Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	10
2.2.	Ringkasan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	11
3.1.	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	22
3.2.	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	25
3.3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	28
3.4.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.	33
3.5.	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	36
3.6.	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	39
3.7.	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua	41
3.8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	43
3.9.	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif yang Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	46
3.10.	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	49
3.11.	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	52
3.12.	Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	55
3.13.	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	57
3.14.	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	59
3.15.	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	61
3.16.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	65
3.17.	Menguatkan Saran Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	67
4.1.	Praktik Baik Pilar Sosial	70
4.2.	Praktik Baik Pilar Ekonomi	71
4.3.	Praktik Baik Pilar Lingkungan	72
4.4.	Praktik Baik Pilar Kelembagaan	73





bab 1

PENDAHULUAN

LAPORAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2022

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 pada Tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan TPB/SDGs semua tingkatan: Nasional dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), bahkan sampai ditingkat Masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 1.1.

Prinsip-prinsip Kolaborasi Untuk Pelaksanaan TPB/SDGs
Tahun 2022

PRINSIP - PRINSIP KOLABORASI UNTUK PELAKSANAAN TPB/SDGs DI INDONESIA



Pelaksanaan TPB/SDGs adalah komitmen semua pihak, tidak hanya kewajiban pemerintah, namun harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan lainnya (Akademisi & Pakar; Filantropi & Bisnis ; Organisasi Masyarakat Sipil serta Media). Pemerintah setempat hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademis di seluruh dunia, bahwa jika Global Goals untuk pembangunan Berkelanjutan ini diketahui oleh orang dengan baik dan membuat orang peduli mengenai apa yang telah dijanjikan, para politisi tentunya akan berada dibawah tekanan yang lebih besar untuk merealisasikannya.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam percepatan pencapaian target TPB pada masa pasca pandemi covid-19, mulai dari Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan serta pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menyebabkan perubahan pada seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2022 yang berfokus pada upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia.

Untuk menjawab beragam tantangan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai langkah strategis dengan pada sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, khususnya pemulihan perekonomian yang diharapkan dapat mencapai peningkatan seperti sebelum pandemic Covid-19, begitupun pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan inovasi. Pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas komoditas unggulan sebagai upaya mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekspor dengan indicator pembangunan.

1.2. Metodologi Penyusunan Laporan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs setiap tahun kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme penyusunan laporan tersebut mengacu kepada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs yang telah dirilis oleh Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas pada Agustus 2019. Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah dan nonpemerintah menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan ini, khususnya untuk membahas pencapaian target atas setiap indikator TPB/ SDGs serta kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Hasil dari penyusunan laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

1.3. Sistematika Pelaporan

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut: Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, metodologi penyusunan laporan, serta sistematika laporan.

Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/ SDGs, memberikan gambaran ringkas mengenai status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada masing-masing tujuan di dalam TPB/SDGs.

Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.

Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan ulasan singkat tentang pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian TPB/ SDGs.





Bab 11

RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN

LAPORAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2022

2.1. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pada tahun ke tujuh perjalanannya SDGs, hampir seluruh negara di dunia menghadapi tantangan yang sama, pemulihan pasca pandemi COVID-19. Begitu juga di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai episentrum Indonesia Timur tentu menghadapi tantangan yang tak mudah, terutama dalam pencapaian SDGs.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs melalui berbagai program dan kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh daerah sampai dengan akhir tahun 2022 antara lain: (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator TPB/SDGs pada setiap target dan tujuan, (iii) membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan TPB/SDGs yang melibatkan *stakeholder* terkait, (iv) menyusun rencana aksi daerah terkait dengan implementasi TPB/SDGs di Sulawesi Selatan, dan (v) mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam document perencanaan daerah.

TPB/SDGs merupakan komitmen Internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan Nasional dan Daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD.

Begitupun dengan Isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Adapun poin-poin TPB yang sejalan dengan isu strategis Pembangunan daerah, yaitu:

MISI 1:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang
2. Berorientasi Melayani dan Inovatif
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar

MISI 2:

1. Mewujudkan Infrastruktur yang
2. Berkualitas dan Aksesibel
3. Meningkatnya kapasitas dan
4. kualitas infrastruktur wilayah.

MISI 3:

1. Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan
2. Ekonomi Baru yang Produktif

MISI 4:

1. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
2. Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat;
3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

MISI 5:

1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing
2. Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam;
4. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

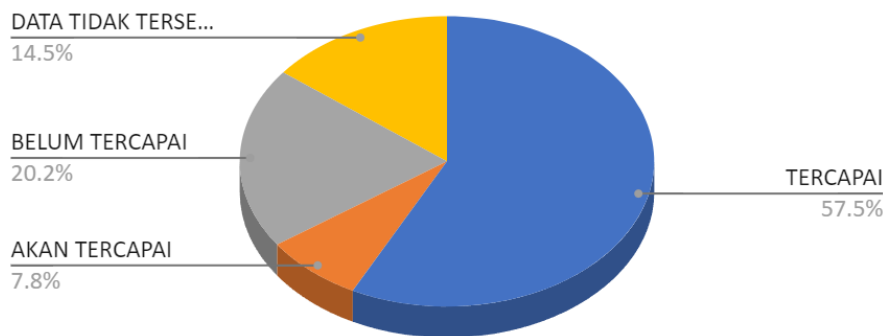
2.2. Ringkasan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: mencapai target (berlabel BIRU), akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (berlabel ORANGE), serta memerlukan perhatian khusus karena disamping belum mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding periode sebelumnya (berlabel ABU-ABU). Provinsi Sulawesi Selatan menentukan target sebanyak 193 Indikator yang termuat didalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 dengan Evaluasi Capaian Berdasarkan Target RAD SDGS Tahun 2022 yaitu 110 Indikator (57,5%) telah tercapai target, 39 Indikator (20,2%) belum tercapai target, 15 Indikator (7,77%) capaian yang membaik dan 15 Indikator (7,77%) yang datanya tidak tersedia.

Gambar 2.1.

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022

GRAFIK CAPAIAN TPB/SDGs PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022



Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2022)

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 83 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 46 indikator telah mencapai target. Sebanyak 8 indikator tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 22 indikator.

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 47 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 27 indikator telah mencapai target. Sebanyak 4 indikator tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 9 indikator

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup sebanyak 48 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 31 indikator telah mencapai target. Sebanyak 1 indikator tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 8 indikator

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup sebanyak 15 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 7 indikator telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya

baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 0 indikator

Tabel 2.1.

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Pilar	Jumlah Indikator	Tercapai	%	Belum Tercapai	%	Akan Tercapai	%	Data Tidak Tersedia	%
Pilar sosial	83	46	54,22%	22	26,51%	8	9,64%	8	9,64%
Pilar Ekonomi	47	27	57,45%	9	19,15%	4	8,51%	7	14,89%
Pilar Lingkungan	48	31	64,58%	8	16,67%	1	2,08%	8	16,67%
Pilar Kelembagaan	15	7	46,67%	0	0,0%	2	13,33%	6	40%
	193	111		39		15		28	

Sumber: Data diolah, 2022

Kondisi pencapaian pada indikator TPB/SDGs pada tahun 2022 merupakan masa pemulihan kondisi ekonom dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Usaha Pemulihan dari pengaruh pandemi tentu saja menjadi fokus utama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan strategi dan program kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia.

Ringkasan Tujuan 1

Pada tujuan 1 tanpa kemiskinan, dari total 21 Indikator yang dilaksanakan sebanyak 17 Indikator yang telah mencapai target, 1 Indikator membaik dari tahun sebelumnya dan 2 Indikator yang belum mencapai target di tahun 2022. Indikator yang menunjukkan keberhasilan pencapaian yaitu indikator 1.2.1*, indikator 1.3.1.(a), indikator 1.3.1.(b), indikator 1.3.1.(c), indikator 1.3.1.(d), indikator 1.4.1.(a), indikator 1.4.1.(e), indikator 1.4.1.(f), indikator 1.4.1.(i), indikator 1.4.1.(j), indikator 1.5.1*, indikator 1.5.1.(a), indikator 1.5.1.(b), indikator 1.5.1.(c), indikator 1.5.1.(e), indikator 1.5.2. (a) dan indikator 1.5.3*. Indikator 1.2.1* terkait Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur terjadi penurunan selama masa pandemi dari sebesar 8,78 persen pada Maret 2021 menjadi 8,66 persen pada Maret 2022.

Kemudian indikator dengan peningkatan pencapaian yang paling signifikan ialah indikator 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan yang mengalami penurunan sebanyak 1.255 Jiwa yang pada tahun 2021 sebanyak 365.669 jiwa menurun menjadi 364.414 Jiwa pada tahun 2022. Untuk indikator yang mengalami peningkatan dan membaik namun belum mencapai target yaitu indikator 1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan yang mengalami peningkatan capaian pada tahun 2022 yaitu 100 persen dibanding pencapaian dari tahun 2021 yang mencapai 92,97 persen namun belum mencapai target di tahun 2022 sebesar 99 persen. Kemudian untuk indikator yang tidak tercapai adalah indikator 1.4.1.(c) dan indikator 1.4.1.(k). Salah satu indikator yang mengalami penurunan capaian adalah indikator 1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang hanya mencapai 49,43 persen di tahun 2022 dengan target 71,51 persen.

Ringkasan Tujuan 2

Pada tujuan 2 tanpa kelaparan, 3 indikator yang telah mencapai target, 1 indikator membaik dan 3 indikator tidak tercapai dari total 10 Indikator. Indikator yang mencapai di tahun 2022 yaitu indikator 2.1.2*, indikator 2.2.2.(a) dan indikator 2.2.2.(b). Indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tercatat membaik dari 19% (2021) naik menjadi 21,7% (2022). Untuk indikator yang mengalami peningkatan dan membaik ialah indikator 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe dengan capaian 8,3 persen di tahun 2022. Kemudian untuk indikator yang belum mencapai target yaitu indikator 2.1.1*, indikator 2.1.1.(a)* dan indikator 2.2.2*(a). Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, hanya mencapai 3,78 persen pada tahun 2022 memburuk dari tahun 2021 yang mencapai 4,79 persen.

Ringkasan Tujuan 3

Pada tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, Indikator yang mencapai target di tahun 2022 sebanyak 14 Indikator tercapai, 1 Indikator akan tercapai, 10 indikator belum tercapai dan 5 indikator belum tersedia datanya. Indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target tahunan ialah Indikator 3.1.2.(a), Indikator 3.2.1*, Indikator 3.2.2*, Indikator 3.2.2.(a), Indikator 3.2.2.(b), Indikator 3.3.1.(a), Indikator 3.3.3.(a), Indikator 3.3.4.(a), Indikator 3.4.1.(a), Indikator 3.4.1.(c), Indikator 3.4.2.(a), Indikator 3.7.1.(b), Indikator 3.8.1(a), dan Indikator 3.c.1*. Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 91,67 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2022. Untuk indikator yang akan tercapai pada tahun 2021 ialah indikator 3.7.2.(a). Indikator Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih mengalami penurunan capaian pada tahun 2022 pada angka 94,8 persen memburuk dari capaian tahun 2021 yang mencapai 95,04 persen. Selain itu indikator yang mengalami perlambatan capaian yaitu indikator 3.1.2*, Indikator 3.1.1*, Indikator 3.3.3*, Indikator 3.3.2.(a), Indikator 3.3.5.(a), Indikator 3.4.1.(b), Indikator 3.7.1.(a), Indikator 3.7.2*, Indikator 3.8.2*, Indikator 3.8.2.(a), dan Indikator 3.a.1*

Ringkasan Tujuan 4

Pada tujuan 4 pendidikan berkualitas, menunjukkan pencapaian yang baik pada setiap indikatornya. Dari total 9 indikator menunjukkan 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat, sebesar 101,02 persen tahun pada tahun 2022, meningkat dari tahun 2021 sebesar 87,07 persen. Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun juga menunjukkan positif dengan capaian 8,63 tahun melebihi target 2022 dengan rata-rata 8,42 tahun. Begitu juga dengan capaian Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya pada angka 99,78 meningkat menjadi 96,55 pada tahun 2022.

Ringkasan Tujuan 5

Pada tujuan 5 kesetaraan gender, terdapat 8 capaian yang menunjukkan hasil positif salah satunya capaian pada indikaor 5.2.2.(a) persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2022 telah mencapai 100%. Kemudian untuk capaian yang mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya seperti indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada tahun 2022 berada pada angka 29,50 persen membaik dibanding capaian 2021 yang hanya mencapai 27,4 persen. Untuk indikator yang tidak mencapai target pada tujuan 5 sebanyak 4 indikator salah satunya indikator 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) pada tahun 2022 mengalami capaian memburuk yakni 26,10 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 20 persen.

Ringkasan Tujuan 6

Pada Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak, Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. tercatat mencapai target pada tahun 2022 mencapai 91,96 persen meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 91,18 persen begitu pula dengan indikator 6.1.1.(b), indikator 6.1.1.(c), indikator 6.2.1.(b), indikator 6.2.1.(c), Indikator 6.5.1.(a), indikator 6.5.1.(c), indikator 6.5.1.(e), indikator 6.5.1.(f), Indikator 6.5.1.(g) dan indikator 6.6.1 (e). Untuk capaian indikator 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Mengalami penurunan capaian dimana pada tahun 2022 hanya mencapai 11,509 m³/detik, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,83 m³/detik. Indikator yang mencapai target terjadi pada capaian Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan yang pada 2022 hanya mencapai 91,96 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 15,13 persen.

Ringkasan Tujuan 7

Pada Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, terdapat 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022 yang terdiri dari 2 indikator mencapai target, 2 indikator belum mencapai target dan 1 indikator yang membaik. Indikator 7.2.1* mengenai bauran energi baru terbarukan tercatat dalam tren positif dari 22% pada tahun 2021 meningkat menjadi 27,59% pada tahun 2022. Untuk Indikator 7.1.1* terkait Rasio elektrifikasi pada tahun 2022 mencapai target 98,5 persen dengan capaian pada angka 99,89 persen. Untuk Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita memiliki data capaian 848,93 pada tahun 2022.

Ringkasan Tujuan 8

Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi mengalami beberapa perubahan pada pencapaian indikatornya dimana 8 indikator tercapai, 6 indikator belum tercapai dan 1 data tidak tersedia. Pada indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 mencapai angka 4,11 yang pada tahun sebelumnya mengalami tantangan berupa terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sebesar -1,55 persen. Pencapaian positif ini juga terjadi pada 8.3.1.(b), indikator 8.3.1 (c), indikator 8.5.2*, Indikator 8.5.2(a), Indikator 8.9.1*, Indikator 8.9.1(b) dan indikator 8.10.1.(b). Untuk indikator yang membaik, indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 36,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya 36,76 persen. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 sebanyak 7.590.063 Jiwa mencapai target tahunan sebesar 2.062.000 jiwa. Untuk indikator yang belum mencapai target ialah indikator 8.6.1* mengenai Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) yang berada pada angka 22,61 persen pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 yang berada pada angka 23,78 persen. Indikator 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja belum memiliki data capaian pada tahun 2022.

Ringkasan Tujuan 9

Pada Tujuan 9 industri, inovasi, dan infrastruktur mulai mengalami perbaikan yang pada tahun sebelumnya menghadapi tekanan akibat pandemic. Hal ini tercermin dari pertumbuhan positif pada tahun 2022 indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur yang berada pada angka 9,86 persen dibanding tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif sektor industri manufaktur sebesar 3,02 persen pada tahun 2021. Begitu pula pada indikator 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca yang mencapai target dimana capaian pada tahun 2022 ialah 7,85 persen dimana target pada tahun 2022 ialah 6,00 persen. Namun pencapaian positif ini tidak terjadi pada indikator 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry dimana pada tahun 2021 hanya mencapai angka 8,91 persen jauh dari tahun 2022 sebesar 65 persen.

Ringkasan Tujuan 10

Pada Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan, capaian Koefisien Gini mengalami penurunan yang positif dimana dari 0,382 per September 2021 menjadi 0,377 per September 2022. Namun hal ini tidak tercermin pada Indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang mengalami penurunan capaian pada tahun 2022 yang hanya pada angka 49,43 persen dibanding capaian pada tahun 2021 sebesar 47,12 Untuk indikator lainnya seperti 10.3.1 (a) terkait Indeks kebebasan sipil untuk tahun 2022 belum memiliki data capaian tahunan dan masih perilisasi resmi dari Badan Pusat Statistik.

Ringkasan Tujuan 11

Pada Tujuan 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan mengalami peningkatan capaian pada indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dari 69,11 persen (2021) menjadi 69,90 persen (2022). Indikator yang tercapai juga terjadi pada indikator kebencanaan yaitu 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang capaian tahun 2021 berada pada angka 154,87 menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 157,07. Adapun Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani

mengalami penurunan dimana tahun 2022 pada angka 54,48 persen dengan target tahunan yaitu sebesar 73 persen.

Ringkasan Tujuan 12

Pada Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab menunjukkan penurunan capaian yang negatif, terlihat dari jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada tahun 2022 hanya mencapai 174,375 ton/hari sedangkan target yang diinginkan ialah pada 45,55 ton/hari. Indikator 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) juga mengalami hal serupa dimana jumlah sampah limbah B3 yang diolah hanya mencapai 5.557.493,578 Ton jauh dari target tahunan yang sebesar 4.589.838.184 Ton.

Ringkasan Tujuan 13

Pada Tujuan 13 penanganan perubahan iklim dilakukan dengan tersedianya pelaksanaan aksi yang termuat dalam 1 dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketersediaan Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai pada indikator 13.2.1.(a) juga berhasil dicapai dengan tersedianya 1 dokumen pelaporannya pada tahun 2022.

Ringkasan Tujuan 14

Pada Tujuan 14 ekosistem lautan, Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2021 pada angka 63,87 mengalami penurunan akibat adanya kesulitan bagi pelaku usaha terkait pengurusan administrasi perijinan. Adapun di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan mencapai angka 94,01 persen jauh dari target tahunan yang berada pada angka 88,73 persen. Pada indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi dengan angka 0 nelayan pada tahun 2022 dimana target tahunan berada pada angka 12 nelayan.

Ringkasan Tujuan 15

Pada Tujuan 15 ekosistem daratan Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada tahun 2022 mencapai 24 KPH sesuai dengan target tahun 2022 yaitu 16 KPH. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan yang

termuat pada indikator 15.3.1.(a) juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target dengan capaian 0,71 persen pada tahun 2022 dengan target 0,99 persen. Untuk capaian lainnya masih belum memiliki data capaian seperti pada indikator 15.1.1(a) dan Indikator 15.2.1.(b)

Ringkasan Tujuan 16

Pada Tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat menunjukkan pencapaian positif pada beberapa indikator seperti pada indikator 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang mengalami peningkatan angka korban pada tahun 2022 yaitu 0,11 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang ada pada angka 0,091 persen. Pencapaian Indikator 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dapat mencapai target dengan nilai B atau 68,08 Persen dengan target tahunan yaitu nilai A atau 80,00 persen. 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan tidak dapat mencapai target dengan capaian hanya berada pada angka 28,33 dari target tahunan yaitu 100 persen. Beberapa Indikator juga masih belum memiliki capaian seperti indikator 16.1.1.(a), Indikator 16.2.1.(a), Indikator 16.7.2.(a), Indikator 16.7.2.(b) dan Indikator 16.7.2.(c)

Ringkasan Tujuan 16

Pada Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan terwujud dengan pencapaian indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,80 persen meningkat dari tahun 2021 hanya mencapai 0,00 persen. Indikator 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama yang mencapai target tahunan dengan capaian 98,8 persen.

Pada Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan terwujud dengan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik yang meningkat dari 45,57 persen pada tahun 2021 menjadi 65,08 persen pada tahun 2022.

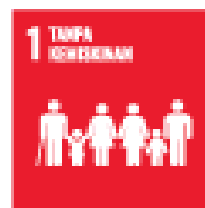


bab 111

TINJAUAN STATUS

LAPORAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2022

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN



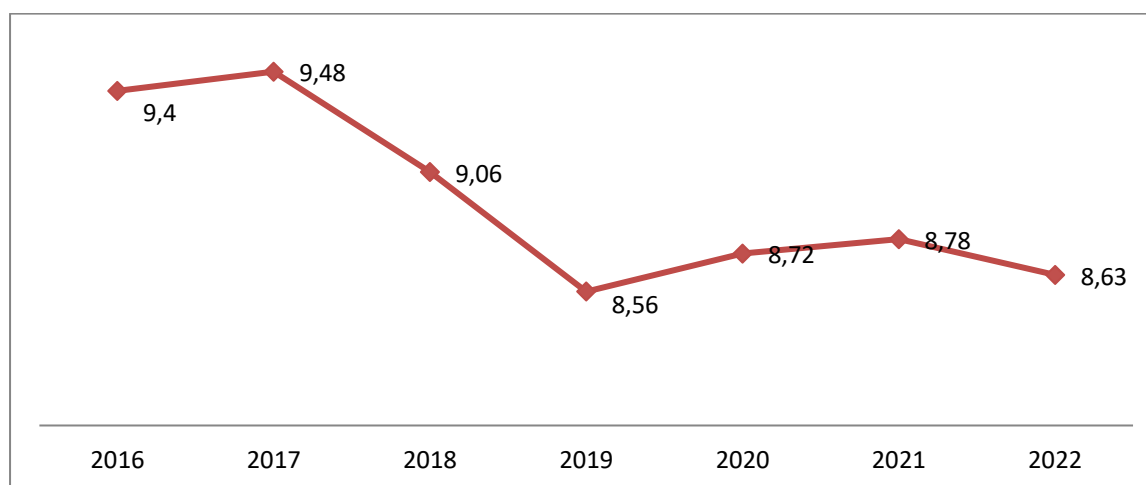
3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 8,63 persen, nilai tersebut menunjukkan adanya perbaikan dengan penurunan sebesar 0,15 poin dari tahun 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 765,46 ribu orang menurun sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipicu oleh pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan yang terjadi ditahun 2021 merupakan pengaruh dari pasca covid khususnya pada ector UMKM dan pariwisata yang mulai membuka peluang lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.

Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator 1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Grafik 1.1 Persentase Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, 2017-2022 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan mengalami penurunan yaitu 8,63 persen dibanding

tahun 2021 yang hanya mencapai 8,78. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan Sulawesi selatan selama tahun 2016-2022 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,54 persen. Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 9,80 persen pada tahun 2022 telah tercapai

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 813,07 ribu jiwa (9,48%). Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2016-2022 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (September 2022) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 777,44 ribu jiwa (8,63%). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (784,98 ribu jiwa), terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 7,54 ribu jiwa

Secara nasional, jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan berkontribusi 2,90 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional. Salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan ialah dampak dari Pandemi *COVID-19* seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga bertambahnya masyarakat yang rentan miskin jatuh dalam garis kemiskinan.

Arah Kebijakan

Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) TPB/SDGs, telah membuat Arah Kebijakan yang mendukung tujuan ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dari 840.000 jiwa menjadi 1,7 juta jiwa, sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan dengan mengurangi beban masyarakat pada urusan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ORSOS/LSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan dalam mendayagunaan sumber kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya;
5. Penyediaan Bantuan Berupa Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Miskin;
6. Penguatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Pemberian bantuan.

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari tujuan ini adalah :

1. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun belum optimal.
2. Masih minimnya penyandang Disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
3. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
4. Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang belum optimal
5. Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam
6. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.
7. Minimnya tempat-tempat sosial/penampungan bagi usia lanjut.

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN



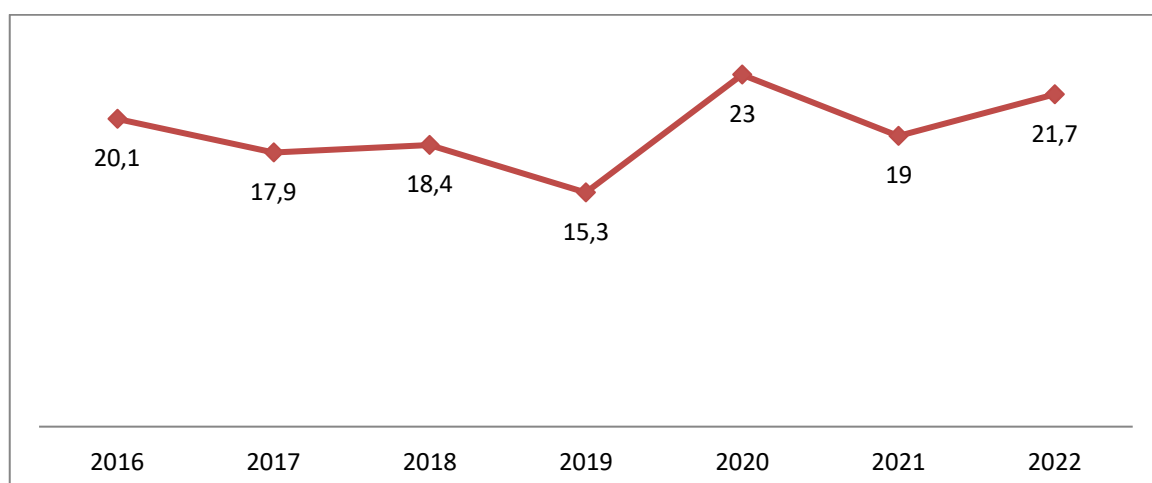
3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 TPB/SDGs berupaya untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 9 indikator. Salah satu target tersebut ialah Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

Grafik 2.1 Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita (Gizi Kurang) Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

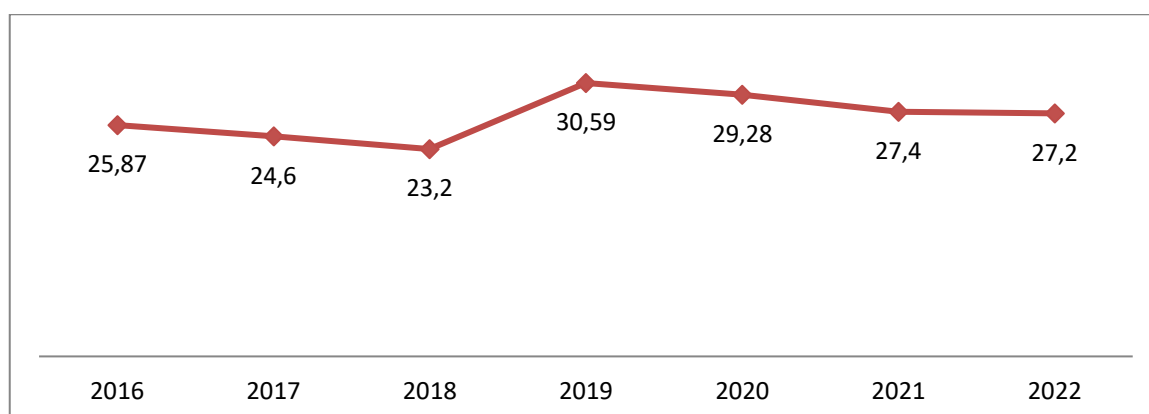
Prevalensi stunting di Sulawesi Selatan pada anak Balita masih cukup tinggi, walaupun terjadi fluktuatif selama periode 2016-2022. Pada tahun 2022 proporsi

stunting pada anak balita adalah sebesar 21,7 persen meningkat dari angka 19 persen di tahun 2021. Salah satu penyebab peningkatan ini ialah belum maksimalnya program yang mampu menurunkan risiko gangguan pada pemenuhan gizi karena terbatasnya akses dan distribusi pangan dan protein hewani akibat Dampak Pandemi *COVID-19*.

Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Grafik 2.2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2021



Sumber: Dinas Kesehatan, E-PPGBM, SSGBI, 2022

Persentase balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2022 berfluktuasi namun mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Meskipun telah mengalami penurunan namun belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2022.

Faktor pendorong tercapainya penurunan persentase balita stunting dari tahun 2018 hingga 2022 adalah tersedianya alokasi makanan tambahan ibu hamil KEK bersumber dana Penugasan/DAK Fisik 2021 sejumlah 51.990 ton dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bersumber dari dana Dekonsentrasi/Kemenkes RI, tersedianya alokasi makanan tambahan balita gizi kurang bersumber dari dana Penugasan / DAK Fisik 2021 sejumlah 82.363 ton serta adanya data balita gizi kurang by name by address sasaran PMT dari data aplikasi e-PPGBM (aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Beberapa faktor penghambat

diantaranya alokasi distribusi di tingkat Puskesmas belum merata sehingga masih ada puskesmas yang kelebihan / kekurangan stok PMT , masih ada puskesmas yang terlambat mendistribusikan PMT ke sasaran serta masih ada puskesmas yang tidak mendistribusikan PMT ke sasaran sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil dengan alasan pemerataan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pilar sosial dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs Menghilangkan Kelaparan, yakni:

1. Percepatan penurunan stunting melalui Aksi Stop Stunting dengan melakukan pendampingan gizi kepada ibu hamil, serta pemberian paket intervensi gizi (tablet tambah darah dan PMT);
2. Perbaiki pelayanan kesehatan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan 1000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan;
3. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan;
4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura;
5. Peningkatan Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan;
6. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
7. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama;
8. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
9. Pengembangan BPP sebagai Sentra Informasi Pertanian;
10. Pembinaan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani.

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari TPB ini adalah :

1. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
2. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
3. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
4. Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
5. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



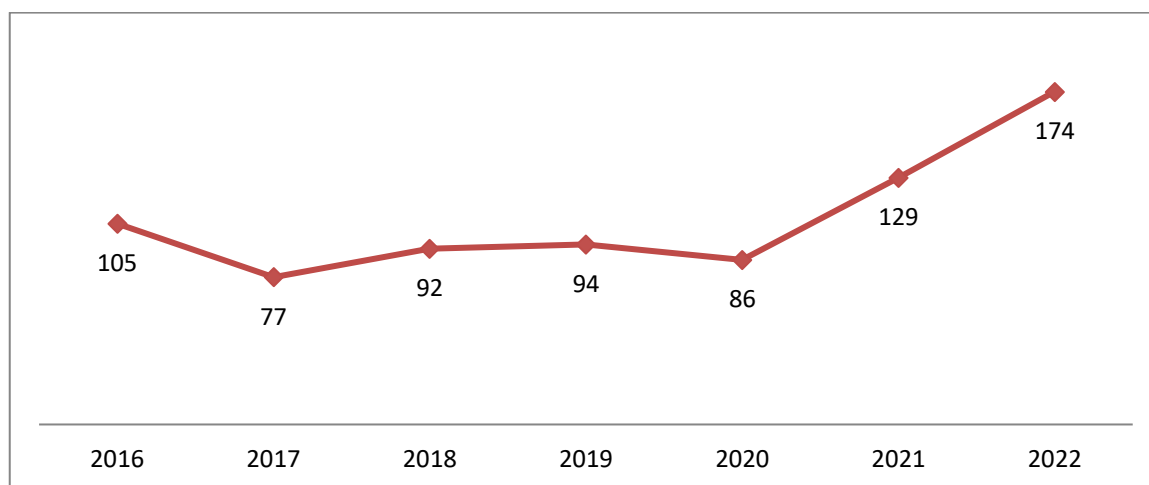
3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan ini berbicara tentang bagaimana masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar. Salah satu upaya kunci untuk mencapai Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Bayi.

Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator 3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Grafik 3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibudisebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan

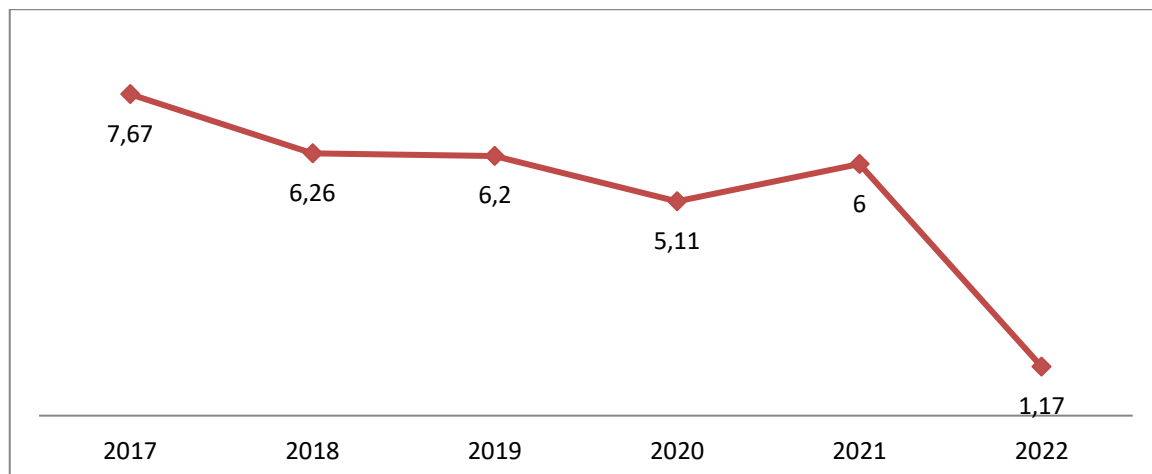


kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. Kasus kematian ibu pada tahun 2022 sebesar 174 Kasus meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 129 Kasus. Hal ini terjadi karena Permasalahan Regulasi dan Keuangan yang dimana akibat tidak semua Kabupaten/Kota memiliki regulasi terkait pelayanan KIA dan Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai dukungan Anggaran bersumber APBD Kabupaten/Kota untuk pelayanan KIA

Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Indikator 3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.2 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2022

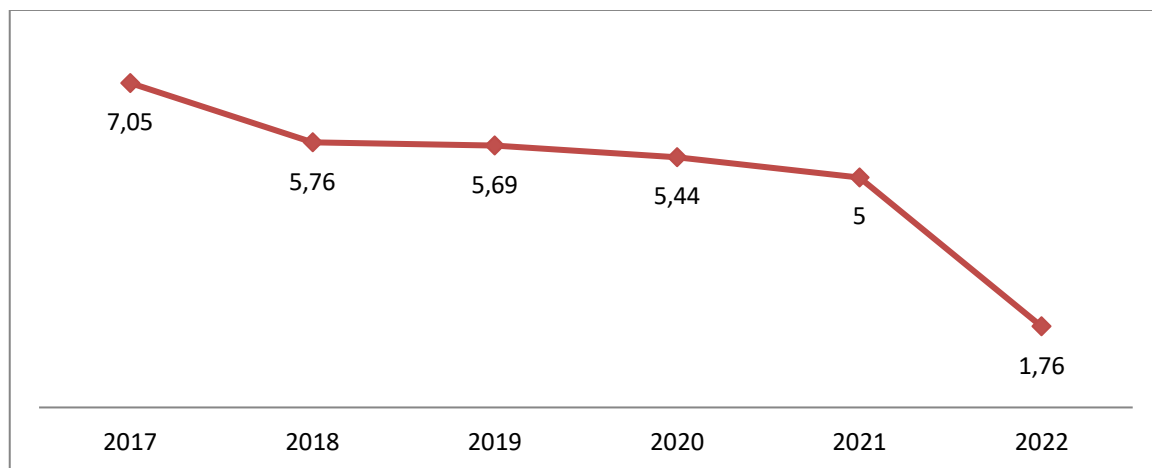


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Sepanjang tahun 2016-2022, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum adekuat. Permasalahan utamanya juga muncul pada penanganan Operasional terkait penanganan kelahiran bayi dimana kurangnya kualitas kesehatan ibu sebelum dan saat hamil sampai melahirkan

Indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas) Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan

Sepanjang tahun 2016-2021, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup cenderung mengalami penurunan, Hal ini dikarenakan adanya beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat, dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab terbanyak kematian dimasa neonatal, yaitu BBLR dan Asfiksia, sementara

pada masa bayi penyebab kematiannya adalah Pneumonia dan Diare, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Sulawesi Selatan yang mendukung pencapaian target Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah "Meningkatkan keterpenuhan sarana prasarana pelayanan Kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan ". Arah kebijakan dari strategi tersebut, yaitu Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan Upaya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Kedaruratan di Sulawesi Selatan, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Penyediaan dan Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan kefarmasian. Kemudian program pembangunan Rumah Sakit Regional Lamapappenning diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat utamanya untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Anak yang masih cukup tinggi.

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari TPB ini adalah :

1. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
2. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
3. Masih rendahnya cakupan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.
4. Rendahnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
5. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
6. Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi
7. Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
8. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Nifas
9. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita
10. Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin.
11. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;

12. Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
13. Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



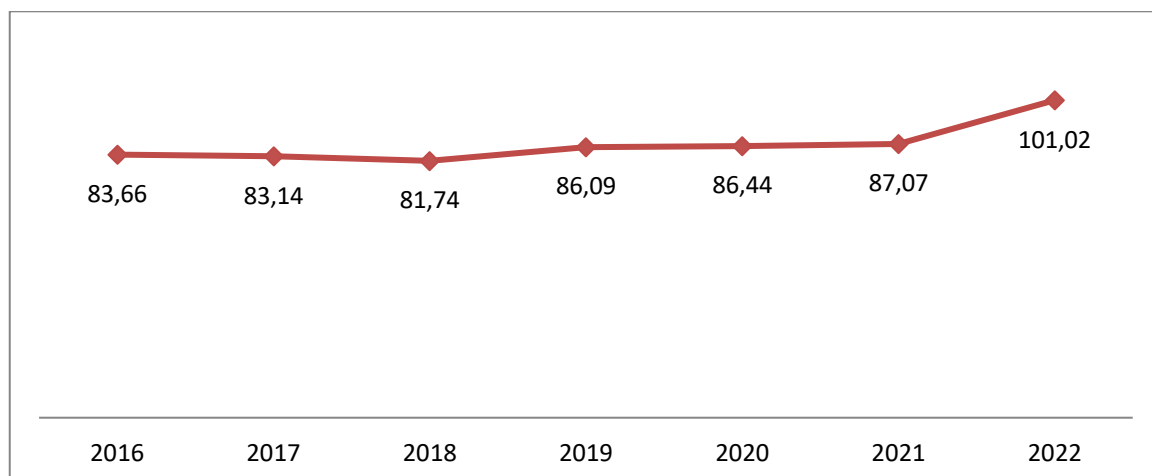
3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Tujuan 4 TPB/SDGs berupaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030.

Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Indikator 4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Grafik 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah perbandingan jumlah siswa SMA sederajat berapapun usianya dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16 hingga 18 tahun. Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2022 Target APK dalam RAD RPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan adalah 82,99 persen dan Capaian (APK)

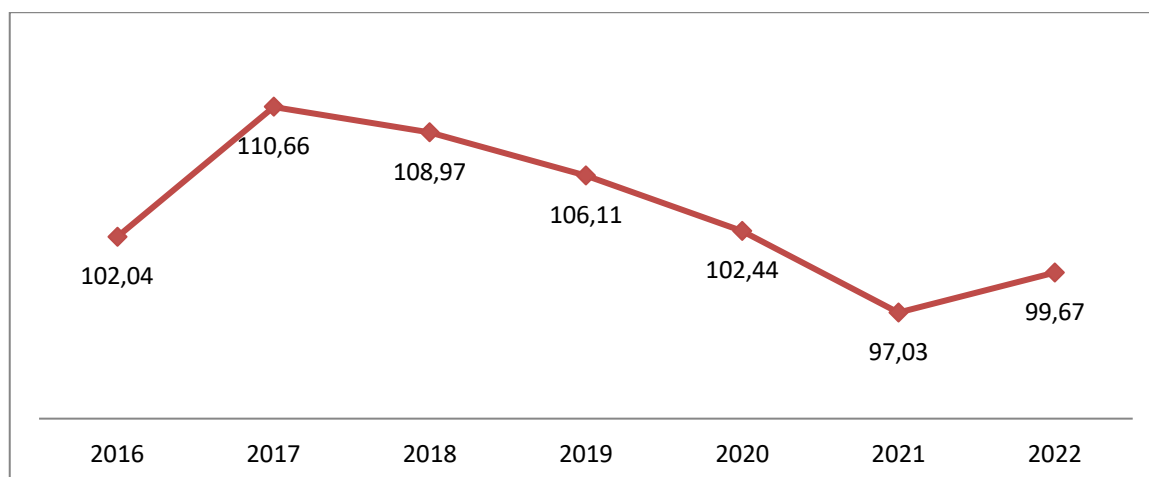


Sekolah Menengah yaitu 101,02 persen. Hal ini dapat terjadi karena adanya pembangunan Unit Sekolah Baru merupakan salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, khususnya di Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terpencil. Selain itu adanya Bantuan Dana BOS dan Bantuan lainnya juga menjadi faktor pendorong tercapainya target ini.

Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Indikator 4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi

Grafik 4.2 Rasio Angka Partisipasi Manusia SMA/SMK/MA/ sederajat Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data di atas, Capaian APM mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2018-2022. Walaupun Pada tahun 2022 capaian mengalami kenaikan mendai

99,67 persen namun masih mencapai target Rasio APM yaitu 89,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasio APM di Sulawesi Selatan telah tercapai.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan berkualitas adalah Perluasan Akses Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu, Perbaikan fasilitas pembelajaran pendidikan menengah dan khusus, Peningkatan Mutu Pendidik / Tenaga Kependidikan yang Inovatif dan kreatif Penyediaan Bantuan Berupa Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Miskin serta Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi sumber daya manusia

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan program-program yang terencana dengan baik. Program yang direncanakan dan diimplementasikan oleh OPD mencakup:

1. Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), melalui inovasi PASTI BERAKSI yang mengedepankan kolaborasi dengan stakeholder terkait (pemerintah kab/kota, pemerintah desa, TNI, Polri, NGO, CSR, dll) dalam penanganan ATS;
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pembinaan Perpustakaan

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan pada tujuan ini :

1. Peningkatan kualitas pendidikan masih perlu dioptimalkan
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM),
3. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun,
4. Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
5. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
6. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama,
7. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
8. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



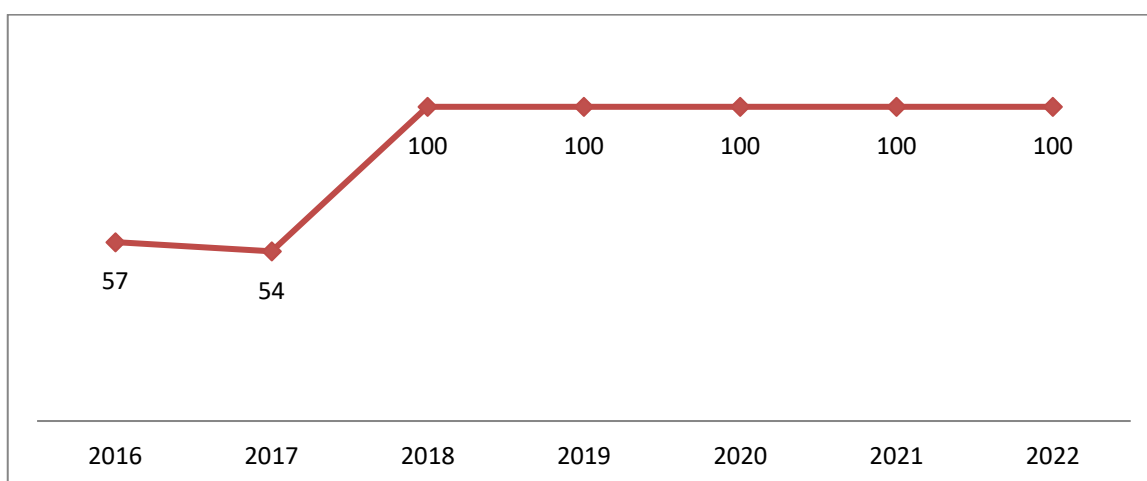
3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 13 indikator.

Target 5.2. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya

Indikator 5.2.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Grafik 5.1 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2021



Sumber: Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan amanat tersebut dengan capaian sebesar 100 persen sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan terus



berkomitmen untuk memenuhinya. Selain layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, perempuan dan anak korban kekerasan juga berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat mulai dari proses penyidikan pada unit perlindungan anak dan perempuan di Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Kota Besar sampai dengan putusan pengadilan yang didampingi oleh oleh petugas dari Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 88 persen pada tahun 2022 telah tercapai.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar social, dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yakni dengan adanya Optimalisasi pelaksanaan regulasi dan perumusan kebijakan maupun pengawasan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan lintas sector, Akselerasi penguatan pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah serta perluasan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, DU dan Media termasuk lembaga Profesi, Akselerasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan penyediaan kader / fasilitator layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, poltik dan hukum yang terstandar, Meningkatkan keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social politik dan hukum melalui pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender pilot project di kab/kota, Akselerasi perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan, Optimalisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan termasuk layanan rujukan , dan meningkatkan kapasitas SDM petugas layanan maupun penyediaan sarpras layanan perlindungan perempuan sesuai standar, Meningkatkan jaringan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan maupun intesitas KIE lembaga layanan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan pada tingkat propinsi dan kab/kota, kselerasi Perumusan Kebijakan dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan ketahanan dan kualitas keluarga, Akselerasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan, serta meningkatkan kapasitas petugas lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga di provinsi dan kab/kota, Meningkatkan jaringan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga yang ada di daerah, Terwujudnya pelaksanaan indicator-indikator ketahanan dan keluarga, Akselerasi

Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah, Peningkatan capaian KLA dngan melibatkan Lembaga Non Pemerintah , DU, Media Massa dan Forum Anak, Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan PUHA dan Perlindungan Khusus Anak yang terstandar, Akselerasi Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan system data gender dan anak di daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem data gender dan anak serta sumberdaya pengelola data dan informasi, Peningkatan pengelolaan data dan informasi ktP/ktA dan data terpilah berbasis system website ditingkat provinsi dan kab/kota, dan Optimalisasi pembinaan Kab/Kota dalam penyediaan system informasi gender dan anak dan SIMFONI PPA di Provinsi

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



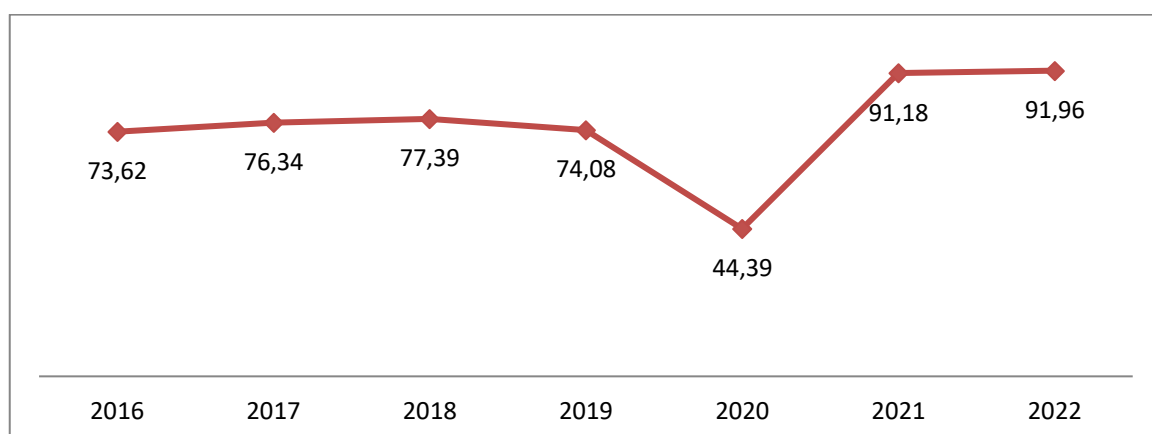
3.6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Indikator 6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Grafik 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

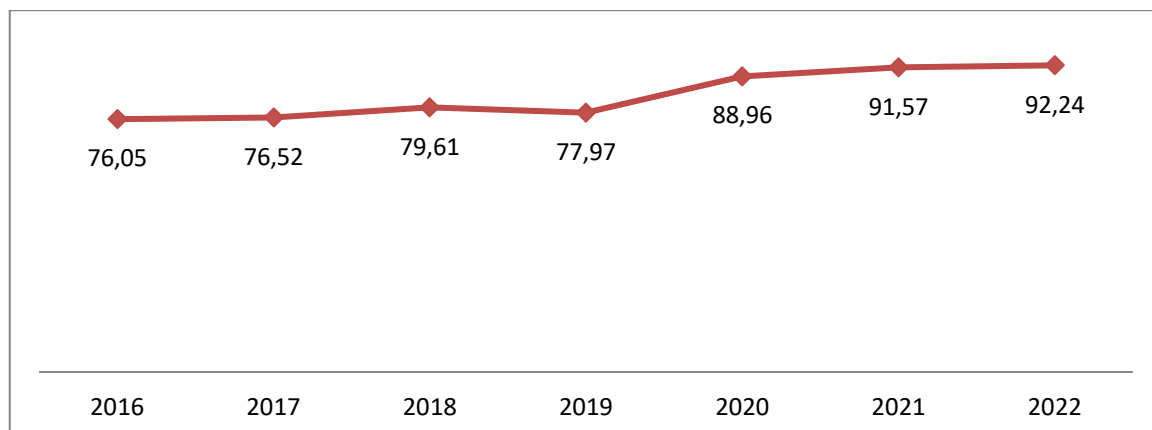
Selama tahun 2016-2022, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak berfluktuasi setiap tahunnya, yaitu dari 91,18 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 91,96 persen pada tahun 2022.



Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Indikator 6.2.1(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Grafik 6.2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama tahun 2016 hingga 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan mencapai 92,24 persen dibanding capaian pada tahun 2021 yaitu 91,57 persen.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Air Bersih dan Sanitasi adalah Pemenuhan kualitas dan kuantitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota, Pemenuhan kualitas dan kuantitas Air Limbah Domestik Regional, Peningkatan koordinasi pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air, Peningkatan Sarana Sumber Air Bersih dari Sumur Bor, Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran air minum dan sanitasi, Memfasilitasi penyediaan sistem penyediaan air minum di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, Pembangunan infrastruktur sumberdaya air

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



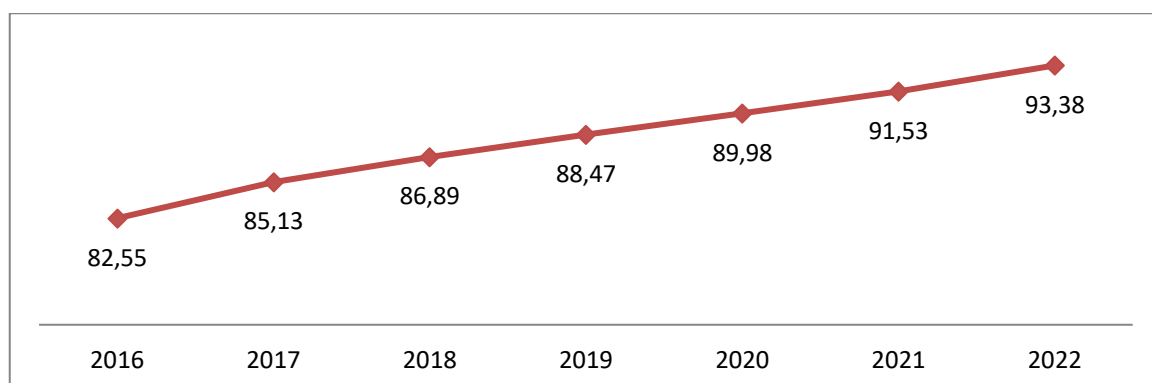
3.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua

Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, energi dirumuskan di dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat.

Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Indikator 7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Grafik 7.1 Rasio penggunaan gas rumah tangga, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Angka Rasio penggunaan gas rumah tangga digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman. Rasio penggunaan gas rumah tangga Sulawesi Selatan terus meningkat enam tahun terakhir. Tahun 2016 rasio penggunaan gas rumah tangga sebesar 82,55 persen kemudian menjadi 93,38



persen di tahun 2022. Target di dalam RAD TPB/SDGs adalah 90 persen sehingga untuk capaian rasio pengguna gas rumah tangga membaik (akan tercapai)

Arah Kebijakan

Ketersediaan energi merupakan salah satu pendukung utama peningkatan daya saing perekonomian. Prioritas pemerintah dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi adalah Peningkatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dikhususkan bagi para kontraktor dan penambang yang tidak patuh pada aturan yang berlaku, Peningkatan pelayanan perizinan bagi penambang skala menengah dan skala kecil, Peningkatan kualitas pelayanan pengujian bagi usaha mineral, para pengguna air tanah dan masyarakat umum, Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat terutama dalam produksi energi baru terbarukan, Peningkatan pengelolaan konservasi energi dan ketenagalistrikan Arah kebijakan pencapaian tujuan ini yaitu pembangunan infrastruktur energi terbarukan, penyediaan energi listrik yang semakin luas dan merata ke seluruh wilayah.

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



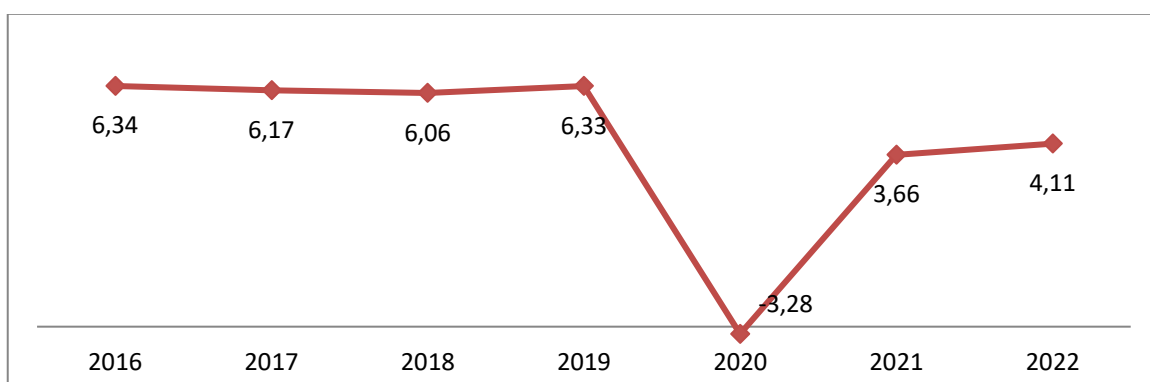
3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (inclusive growth) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (green growth). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Indikator 8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Grafik 8.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



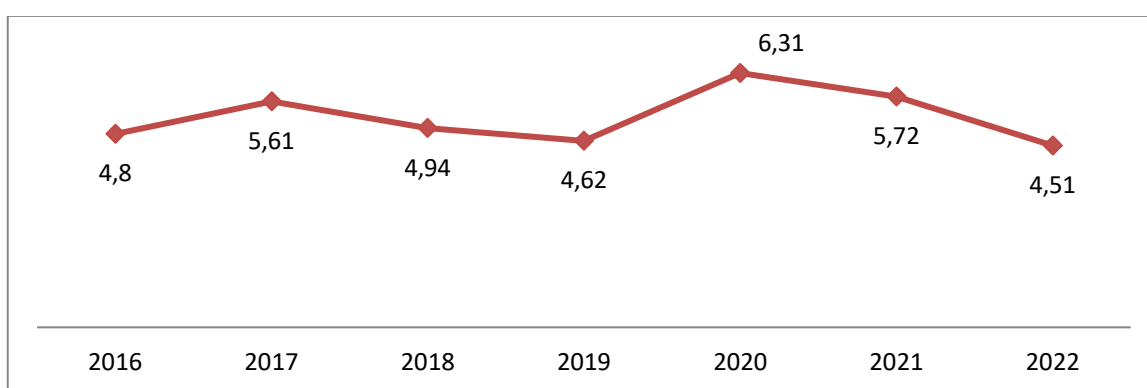
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami tren yang fluktuatif, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan mencapai 6,34 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2018 yaitu sebesar 6,06 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 6,33 persen dan kembali turun hingga mencapai -3,28 persen di tahun 2020. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,66 persen, dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga -3,28 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,11 persen Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya.

Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Indikator 8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Grafik 8.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 juga terkena dampak dari Pandemi COVID-19 karena banyaknya penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 yang mencapai 4,51 menurun 1,21 persen dari tahun 2021 yang mencapai 5,72 persen.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu:

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melalui Pemenuhan sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi serta pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi;
2. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing,
3. Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif;
4. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal;
5. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, bermartabat dan berkeadilan;
6. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
7. Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis data akurat pada sumber-sumber pertumbuhan pada wilayah tersebut serta peletakan dasar infrastruktur pendukung pertumbuhan;
8. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
9. Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional
10. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
11. Pemantapan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



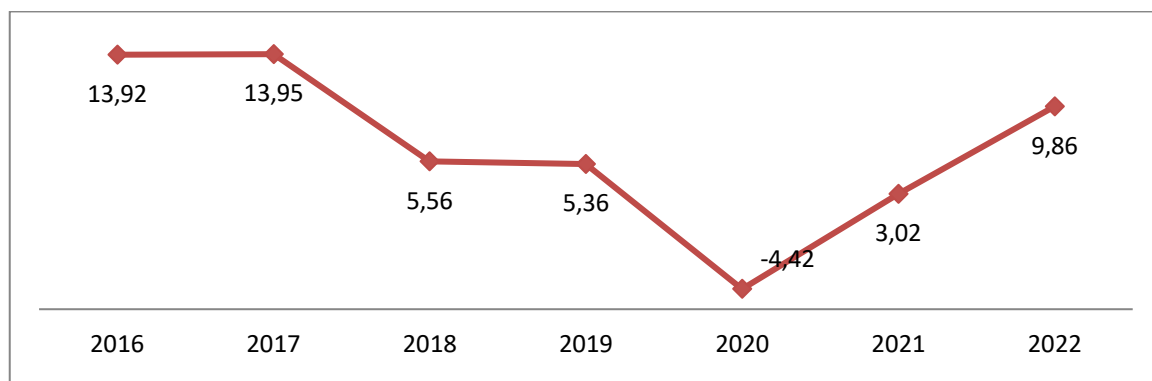
3.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif yang Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru

Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Indikator 9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Grafik 9.1 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



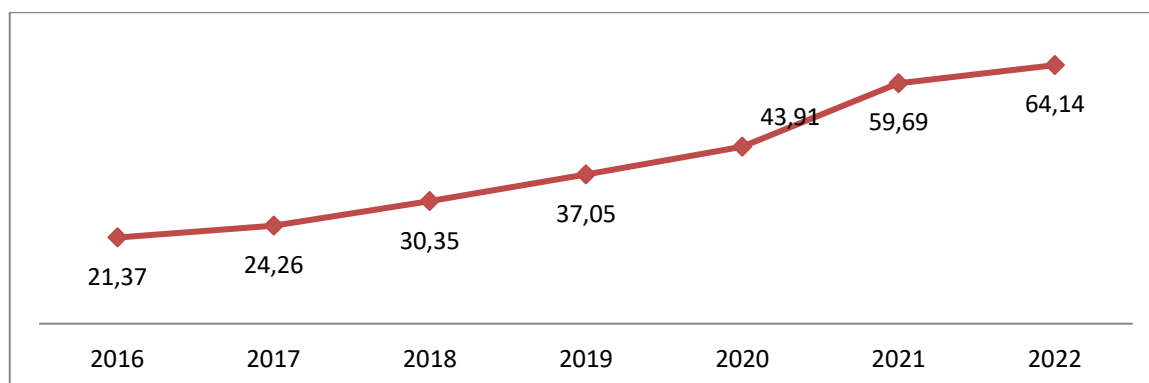
Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru

Target 9.c. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Indikator 9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan internet

Grafik 9.2 Proporsi individu yang menggunakan internet, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya proporsi individu yang memiliki telepon genggam maka proporsi individu yang menggunakan internet juga mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2022 dengan capaian 64,14 persen.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah : Pembinaan pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa, Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi, Peningkatan sarana dan prasana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest area.

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



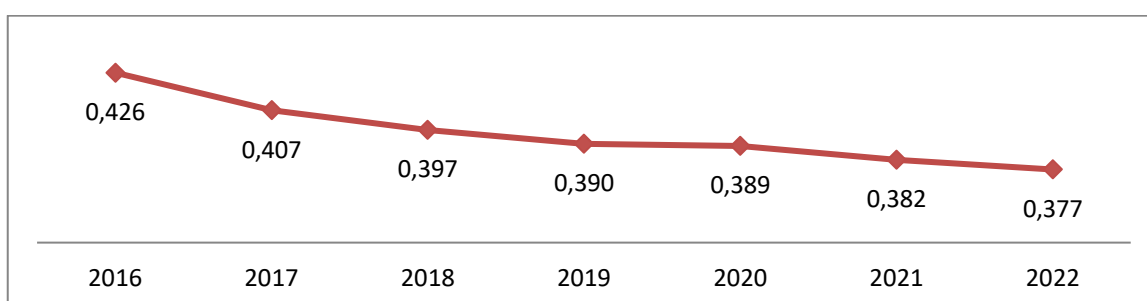
3.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau status lainnya di suatu negara. Tujuan ini juga membahas kesenjangan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi dan bantuan pembangunan. Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan peraturan dan pemantauan pasar keuangan dan institusi, mendorong bantuan pembangunan dan investasi langsung asing ke daerah-daerah di mana kebutuhannya paling besar. Memfasilitasi migrasi yang aman dan mobilitas orang juga menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan yang melebar.

Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indikator 10.1.1 Koefisien Gini

Grafik 10.1 Koefisien Gini Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Nilai koefisien gini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2022. Nilai koefisien gini pada tahun 2022 sebesar 0,377 lebih rendah dibandingkan koefisien gini pada tahun 2021 sebesar 0,382. Nilai koefisien gini pada 2022 telah memenuhi target RAD TPB/SDGs Provinsi yaitu di bawah 0,36.



Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan secara keseluruhan diarahkan untuk menurunkan kesenjangan yang tergambar pada angka koefisien gini. Pencapaian target tujuan ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan pada pencapaian target Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Arah Kebijakan pembangunan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan ini adalah :

1. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal;
3. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
4. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru;
5. Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional;
6. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
8. Pemantapan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tantangan dan Permasalahan pada tujuan 10 antara lain :

1. Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani.
3. Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal.
4. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas.
5. Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani.
6. Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbangan jarak dengan pasar.

7. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
8. Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan
9. Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
10. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;
11. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;
12. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi;
13. Ketransmigrasian Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
14. Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



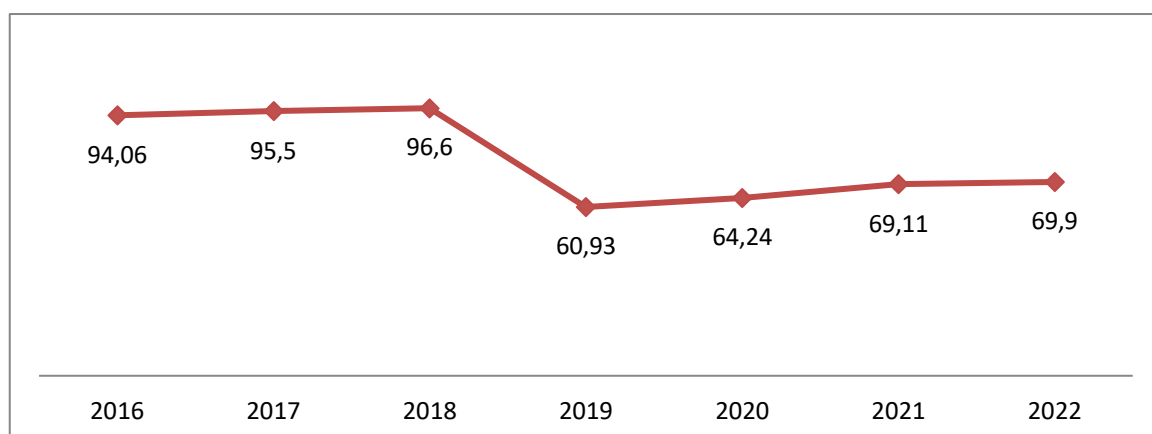
3.11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan driver dari pembangunan berkelanjutan.

Target 11.1. Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Termasuk Penataan Kawasan Kumuh, Serta Akses Terhadap Pelayanan Dasar Perkotaan

Indikator 11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Grafik 11.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, 2016-2022



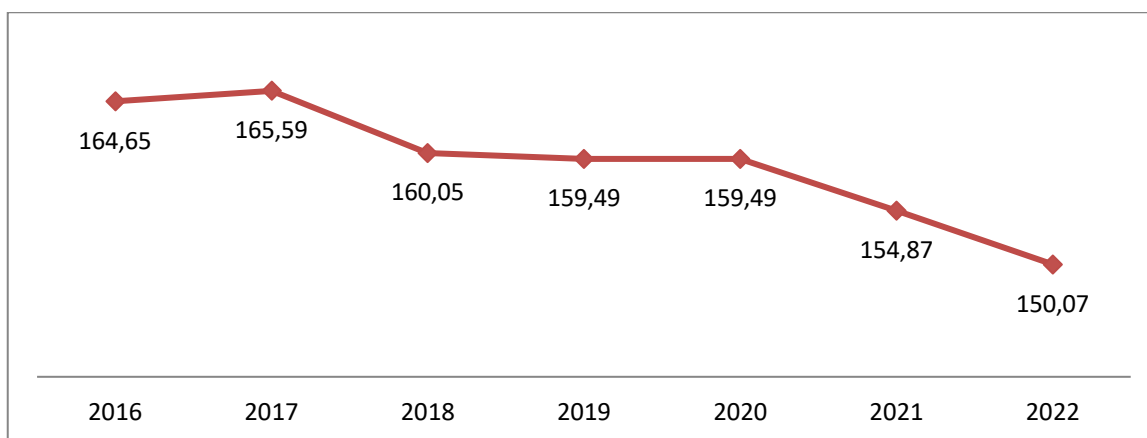
Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa : Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) Kriteria rumah layak huni , yaitu : ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Tahun 2022 besaran rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan sebesar 69.90 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 69,11 pada tahun 2021. Pencapaian rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni tercapai

Target 11.1. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Indikator 11.5.1(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Grafik 11.1 Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Luas wilayah 45.764,53 Km², terdiri dari 24 kabupaten dan kota (BPS dalam angka Sulawesi Selatan, 2022).

Wilayah di Sulawesi Selatan memiliki kondisi geografis yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang kurang baik. Secara umum faktor geologi dan kegempaan, wilayah Sulsel dilalui oleh Sesar Walanae melintang dari barat laut menuju tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beragam ancaman bencana seperti Gempa, banjir, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan gelombang ekstrim dan abrasi. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai angka 150,07 dengan status Risiko Bencana Tinggi.

Arah Kebijakan

Kota dan permukiman yang berkelanjutan yang merupakan tujuan 11 dari TPB yang menargetkan pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana. Target pembangunan ini sesuai dengan kebijakan prioritas Pemerintah Sulawesi Selatan yang sasarannya adalah meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota. Tujuan pembangunan ini juga menargetkan pengurangan kawasan kumuh dengan menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas jasa konsultasi dan produk perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, Memfasilitasi penyediaan prototipe rumah instan sederhana sehat dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta relokasi program pemerintah provinsi, Memfasilitasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dan Menyebarkan informasi kebencanaan hingga lapisan masyarakat paling bawah (keluarga).

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan terhadap Pencapaian Kota dan Permukiman Berkelanjutan

1. Timbulan gas rumah kaca sektor limbah domestik dan persampahan.
2. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata
3. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan
5. Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
6. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak

TUJUAN 12 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



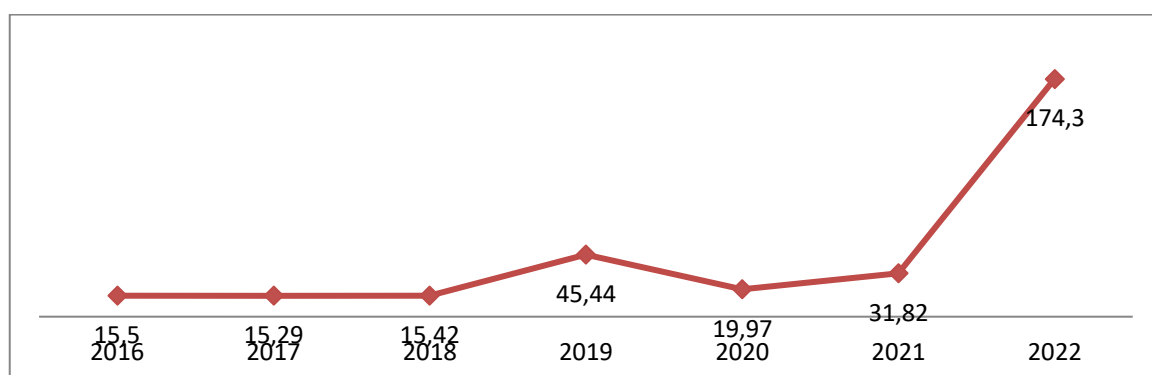
3.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Dalam sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif, karena sebagian besar mereka tidak lagi mengonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang hanya merupakan "simbol" di mana image atau citra menjadi sangat penting. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dunia informasi dan komunikasi. Permasalahan Lingkungan seperti pencemaran, degradasi lahan kritis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi/ industri dan konsumsi yang berlebihan.

Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

Indikator 12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

Grafik 12.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2022

Sistem pengelolaan persampahan harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup

sertabudaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Jumlah timbunan sampah yang di daur ulang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu 174.375 Ton/Hari dibandingkan pengelolaan sampah daur ulang pada tahun 2021 yang mencapai 31,82 Ton/Hari. Hal menunjukkan pada tahun 2022 tercapai berdasarkan target RAD TPB/SDGs Provinsi yaitu di yaitu 45.55 ton/Hari

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan penanganan perubahan iklim, yaitu:

1. Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon;
2. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
4. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
5. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon;

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan terhadap Pencapaian Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah
2. Penegakan Hukum yang masih lemah
3. Ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam tertib melaksanakan regulasi pengelolaan limbah B3 terutama difasilitas penyimpanan limbah B3

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



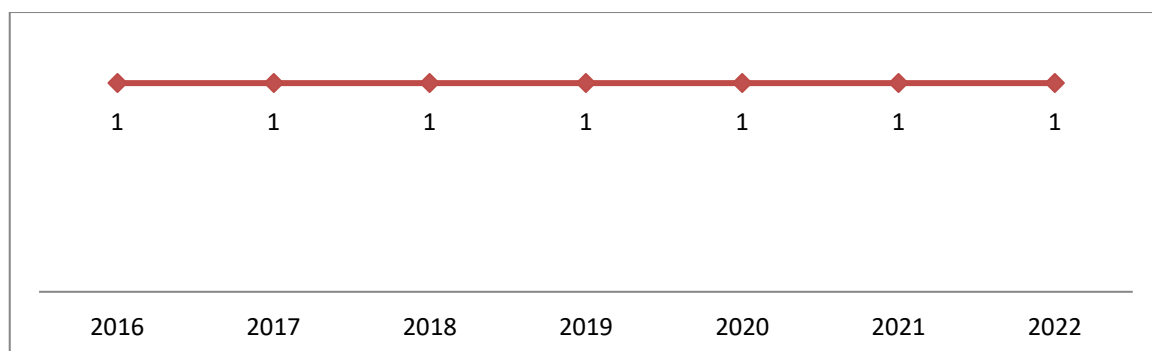
3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Dalam sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif, karena sebagian besar mereka tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang hanya merupakan “simbol” di mana image atau citra menjadi sangat penting. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dunia informasi dan komunikasi. Permasalahan Lingkungan seperti pencemaran, degradasi lahan kritis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi/ industri dan konsumsi yang berlebihan.

Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Indikator 13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Grafik 13.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Berdasarkan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah risiko bencana yang dapat terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; banjir, banjir bandang, longsor, tsunami, cuaca ekstrim, gempa, kebakaran dan kekeringan. Bencana yang paling berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan adalah cuaca ekstrim dan tanah



longsor selain bencana banjir dan gempa. Data kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Maka dari itu setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka dan memperhitungkan kemungkinan ancaman bencana dan kerugian ekonomi yang disebabkan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan penanganan perubahan iklim, yaitu:

1. Penerapan pertumbuhan ekonomi hijau, dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan deforestasi, yang diharapkan mampu memulihkan kerusakan lingkungan;
2. Kebijakan bidang energi dan transportasi dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik;
3. Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon;
4. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
5. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
6. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon;
7. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana :

1. Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi
2. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
3. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan

TUJUAN 14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT



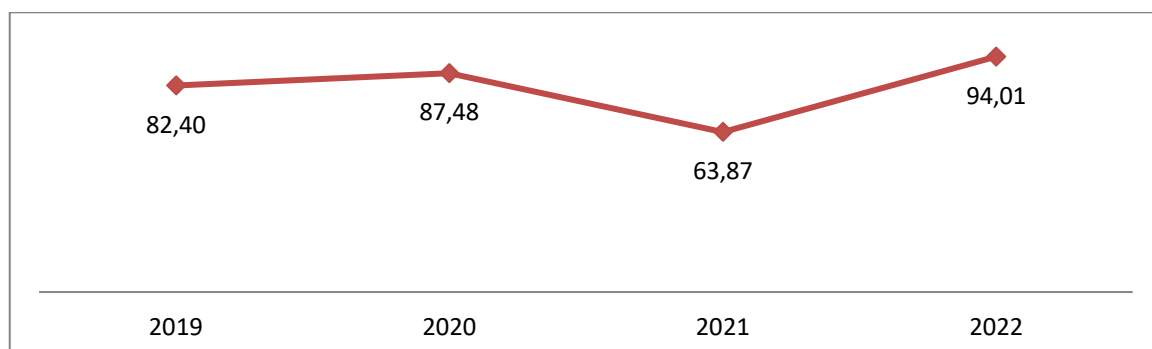
3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumberdaya Alam yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan..

Target 14.6. Pada tahun 2021, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.

Indikator 14.6.1 (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha

Grafik 14.1 Persentase kepatuhan pelaku usaha Provinsi Sulawesi Selatan, 2019-2022



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan , 2022

Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan. Berdasarkan capaian pada tahun 2022 Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah 94,01 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 63.87 persen. Penurunan ini terjadi karena pelaku usaha terkait pengurusan administrasi perijinan sudah optimal.

Arah kebijakan

Tujuan Ekosistem Lautan menargetkan pelestarian wilayah pesisir dan laut serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan melalui Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui kemitraan usaha, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan, Pengembangan usaha pengolahan perikanan, Menjaga Ketersediaan stock ikan, Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam Penanganan Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan :

1. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
2. Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
3. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan.
4. Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
6. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

TUJUAN 15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT



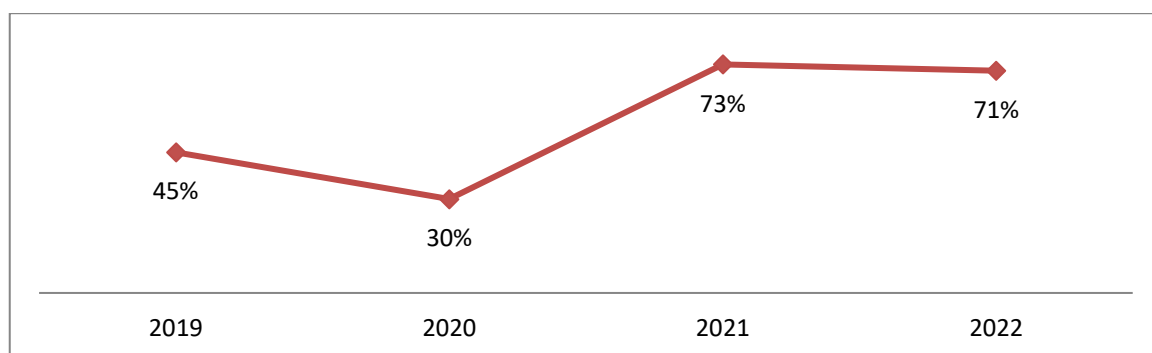
3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Tujuan 15 bertujuan untuk melinfunji tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati.

Target 15.1. Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

Indikator 15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan ke seluruhan.

Grafik 15.1 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi hutan terhadap luas lahan keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan , 2022

Kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 terjadi perubahan rasio luas kawasan luas lahan kritis yang ditrehailitasi terhadap total luas kawasan hutan menjadi sebesar 71% berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha. Dengan demikian luas

kawasan hutan menjadi 2.610.060 Ha terdiri dari luas kawasan hutan lindung seluas 1.144.899 Ha, luas hutan produksi seluas 144.267 Ha, luas hutan produksi terbatas seluas 476.019 Ha, luas hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.844 Ha, luas kawasan konservasi seluas 830.030 Ha. Karena luas kawasan hutan dan luas kawasan lindung ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan, maka rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan adalah tetap selama keputusan penetapan kawasan hutan tidak berubah. Namun demikian pada kenyataannya masih terdapat banyak lokasi kawasan yang masih mendapat klaim kepemilikan oleh masyarakat sehingga terjadi konflik kepemilikan kawasan hutan.

Cakupan lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena program rehabilitasi lahan kritis merupakan salah satu program prioritas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung Ekosistem Daratan khususnya ekosistem hutan adalah : percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat yang akan memberikan akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan di Sulawesi Selatan agar dapat lestari dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan ini juga sesuai dengan arah kebijakan prioritas yakni Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan lestari, Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Mewujudkan upaya preventif dan persuasif dalam rangka pengamanan hutan melalui kegiatan patroli rutin dan penyuluhan dan Mewujudkan masyarakat serta pelaku industri yang peduli terhadap kelestarian hutan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan :

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5. Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
6. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah
7. Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan
8. Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan hutan.
9. Perubahan/ alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan.
10. Tingginya dinamika konflik penguasaan lahan di daerah akibat belum tersosialisasikannya secara baik rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan hingga pada tahap penetapan kawasan hutan dan kawasan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Belum maksimalnya pelayanan publik bidang keplanologian, antara lain disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia dan minimnya fasilitas penunjang kegiatan seperti pengambilan dan penyusunan data spasial bidang kehutanan.
12. Fasilitas berupa peralatan kegiatan inventarisasi hutan masih terbatas
13. Tidak seimbangnya kapasitas izin industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu.
14. Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan.
15. Pelayanan terhadap masyarakat masih terkesan berbelit, lamban dan mahal akibat personil belum ditunjang oleh profesionalisme dan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
16. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan
17. Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
18. Data detail kondisi dan karakteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana pengelolaan belum ada,

sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas.

19. Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL.
20. Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
21. Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan
22. Tingkat sedimentasi sungai masih relatif tinggi, banyak dibutuhkan bangunan perangkap sedimen (gully plug, dam penahan dan Pengendali, rorak dan embung).
23. Tingkat erosi permukaan masih tinggi ditandai dengan tingginya laju aliran permukaan (run off), rendahnya penyerapan (infiltrasi) dan mempengaruhi jumlah kandungan air tanah
24. Konflik Tenurial yang masih berkepanjangan
25. Pengrusakan hutan oleh masyarakat karna alasan ekonomi, batas kawasan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan.
26. Rasio jumlah tenaga Pengamanan Hutan/ Polisi Kehutanan dibanding dengan luas

TUJUAN 16 PERDAMAIAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



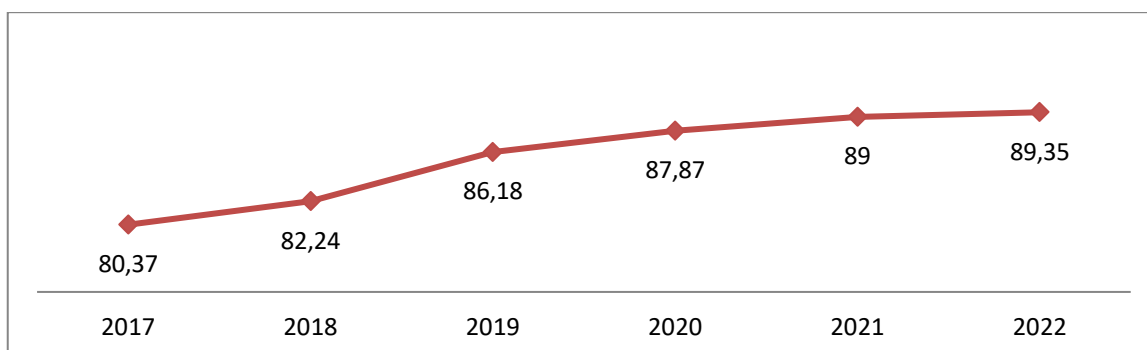
3.16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan negara. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target 16.1. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Indikator 16.9.1 (a) Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran.

Grafik 16.1 Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran. Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pencatatan kelahiran harus dilakukan untuk semua masyarakat, baik semua jenis kelamin maupun semua golongan pendapatan. Selama tahun 2016-2021, persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 persen bawah yang memiliki akta kelahiran terus meningkat. Dari tahun 2016 hingga tahun 2022, indikator ini meningkat sebesar 8,98 poin persentase menjadi 89,35 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran. Tren ini juga memberikan optimisme dalam mencapainya target pemberian identitas yang sah bagi semua.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan tujuan 16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dapat dilihat dari menurunnya angka kriminalitas dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan serta angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh diprioritaskan pada Akselerasi Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah, Peningkatan capaian KLA dngan melibatkan Lembaga Non Pemerintah, DU, Media Massa dan Forum Anak, Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan PUHA dan Perlindungan Khusus Anak yang terstandar, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem data gender dan anak serta sumberdaya pengelola data dan informasi

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam :

1. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
2. Penegakan PERDA belum optimal
3. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public
4. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
5. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.
6. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
7. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
8. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



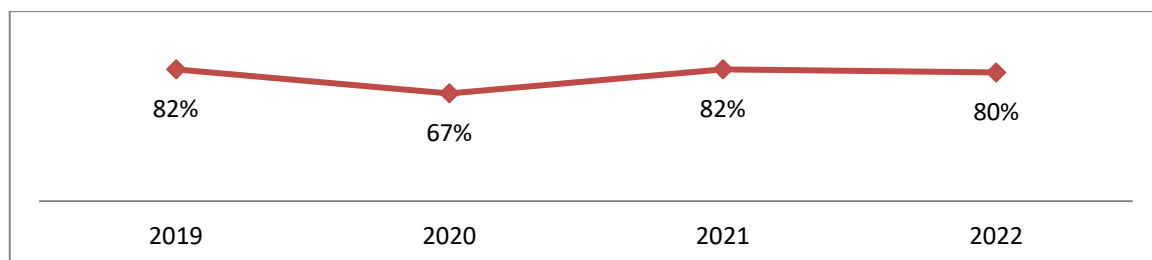
3.17. Menguatkan Saran Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat pada kemitraan dan kerja sama di tingkat global. Pemenuhan target pembangunan harus dilakukan dengan meningkatkan dukungan semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, PBB, dan pemeran aktor global lainnya. Kemitraan ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan negaranegara, khususnya negara-negara tertinggal. Pengembangan ini dilakukan salah satunya dengan mendorong perdagangan internasional dan membantu negara berkembang meningkatkan ekspor.

Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

Grafik 17.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan , 2022

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2 persen dari capaian tahun 2021. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat 4 komponen penyusun pendatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut, factor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap

Arah kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan ekonomi dalam mewujudkan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yakni dengan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan. Perkuatan mobilitas sumber daya domestik tergambar pada meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB untuk membiayai pembangunan merupakan salah satu target Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selain itu penggunaan teknologi dan informasi merupakan salah satu sarana pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang indikator pentingnya antara lain adalah Rasio penerimaan pajak terhadap PDB serta Proporsi individu yang menggunakan internet.

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian target tujuan 17 TPB/SDGs tersebut diprioritaskan pada Merwujudkan Ketersediaan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK, Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Keamanan dan Sarana Pendukung Keamanan Informasi

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam :

1. Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
2. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi



bab IV

PRAKTIK-PRAKTIK BAIK

LAPORAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2022

4.1. Praktik Baik Pilar Sosial

Stunting masih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam bidang kesehatan begitupun kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun.

Upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Dalam mencapai keterpaduan/integrasi tersebut, diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor antara tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya keterpaduan tersebut, maka pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangsa kemudian merumuskan Delapan Program Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi yang wajib diterapkan oleh semua kabupaten/kota lokus.

Program yang mendukung Penurunan Angka Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan **Gammara'na (Gerakan Masyarakat Mencegah Dan Memberantas Stunting)** yang selama ini berjalan telah berevolusi menjadi **Aksi Stop Stunting**, Program ini tetap melaksanakan kegiatan Pencegahan Stunting Melalui Pendampingan Keluarga Khususnya Sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan, utamanya pendampingan gizi kepada ibu hamil, serta pemberian paket intervensi gizi berupa tablet tambah darah dan pemerian makanan tambahan.

Gambar 4.1

Pelaksanaan Kegiatan Aksi Stop Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan



Pelaksanaan aksi stop stunting telah berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting di Sulawesi selatan walau belum turun secara signifikan, capaian prevalensi stunting pada tahun 2022 27,2% yang menurun 0,2% dari tahun 2021 yang berada pada poin 27,4%.

4.2. Praktik Baik Pilar Ekonomi

Program Mandiri Benih merupakan program unggulan sekaligus terobosan dari Gubernur Sulawesi Selatan. pengembangan benih merupakan faktor kunci dalam keberhasilan di bidang pertanian, benih yang ditanam oleh petani harus berkualitas dan diproduksi sendiri di lahan IKB dan lahan petani penangkar di Sulawesi Selatan, tujuannya disamping menjaga mutu proses penangkaran yang dilakukan oleh penangkar, harapannya benih yang dihasilkan memiliki adaptasi tumbuh yang baik karena benih akan ditanam pada ekologi yang sama dengan ekologi penangkaran, Pelaksanaan program mandiri benih di lapangan meliputi berbagai kegiatan yang tidak hanya masalah penangkaran yang menyangkut budidaya tanaman padi, tetapi juga termasuk pelaksanaan pendampingan, pemberdayaan petani penangkar, pengawasan dan pemantauan, sampai pada distribusi benih hasil dari program mandiri benih Pada tahun 2022, Pemprov Sulsel telah menyalurkan sebanyak 2.500 ton benih padi untuk 100 ribu hektare. Jumlah penerima bantuan adalah 120.649 keluarga petani.

Hasilnya berjalan dengan baik, panen sangat memuaskan, dan produksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Data statistik menunjukkan peningkatan produksi padi sebesar 4,92 persen. Dari 5,09 juta ton pada tahun 2021, jumlah tersebut naik menjadi 5,34 juta ton pada tahun 2022. Program Mandiri Benih milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi pilot projek setelah Bappenas tertarik untuk mengembangkannya di daerah lain untuk meningkatkan produksi beras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaunching program Mandiri Benih III dimana ada 2.500 ton bibit dibagikan, dan merupakan benih pokok yang bisa digunakan oleh petani menjadi benih sebar, yang dapat di jadikan bibit.

Gambar 4.2

Pelaksanaan Pelepasan Mandiri Benih Oleh Gubernur Provinsi Sulawesi selatan



4.3. Praktik Baik Pilar Lingkungan

Penyediaan air bersih di pesisir dan kepulauan masih terus menjadi salah satu focus dari pemerintah. Pelaksanaan program Arsinum yang selama ini telah berjalan terus dipertahankan dan lebih diperluas lagi daerah sarannya. **ARSINUM (Air Siap Minum)** dengan menyediakan air bersih melalui pengadaan Alat Pengelolaan Air Siap Minum. Alat tersebut akan menyaring dan memproses air laut menjadi air yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk konsumsi maupun untuk kegiatan rumah tangga. Teknologi ini sebagai solusi dari ketersediaan air bersih Masyarakat yang berada di pesisir dan kepulauan dimana sebelumnya masyarakat membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Gambar 4.3

Alat Pengelola Air Siap Minum di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: sulselprov.go.id

Pemerintah memberi perhatian khusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan di daerah Pulau dan pesisir dengan mengupayakan ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang lainnya. Pada tahun 2022 ada 10 lokasi yang tersebar di kab. Selayar (2 titik), Kab. Pinrang (1 titik), Kab. Enrekang (1 titik), Kab. Sinjai (1 titik), Kab. Jeneponto (1 titik), Kab. Bulukumba (1 titik), Kab. Barru (1 titik), Kab. Pangkep (2 titik).

4.4. Praktik Baik Pilar Kelembagaan

Baruga Pelayanan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan (BARUGA SULSEL) adalah portal digital pelayanan dan pelaporan masyarakat berbasis web dan aplikasi. Program Baruga merupakan langkah pertama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pelayanan ini dengan tagline "Cepat - Tepat - Tuntas" sehingga layanan ini dapat menjawab dengan cepat aduan masyarakat, dan melakukan tindakan dari laporan dengan tepat tuntas. Gubernur sendiri menyambut secara positif. Dengan meluncurnya Baruga versi 2.0 diharapkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi terkait pelayanan dan kegiatan publik beserta melaporkan permasalahan terkait pelayanan publik yang dialaminya. Tidak mungkin Provinsi Sulawesi Selatan dapat Berjaya kembali tanpa ikut serta masyarakat publik. Segera diunduh, Baruga versi 2.0 sekarang tersedia di Apple Appstore dan Google Playstore.

Sebagai bangunan tradisional khas Sulawesi Selatan yang biasanya menjadi tempat kumpul – kumpul atau diskusi masyarakat, merupakan nama yang paling tepat untuk portal digital pelayanan dan pelaporan yang memfasilitasi aspirasi dan keluhan masyarakat. Besar harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk BARUGA SULSEL agar menjadi tempat berkumpul digital bagi masyarakat untuk berdiskusi terkait informasi dan kegiatan publik sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. BARUGA SULSEL juga menyediakan layanan pelaporan untuk masyarakat memberikan masukan dan keluhan terkait layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mungkin masih kurang dan bisa diperbaiki.

Gambar 4.4.

Logo Baruga Sulsel 2.0



Aplikasi BARUGA SULSEL versi 1.0 pertama dibuat dan diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan motto "Cepat, Tepat dan Tuntas". Aplikasi merupakan inovasi dan gebrakan program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. Dalam bulan pertama Aplikasi tersebut diluncurkan, lebih dari 300 laporan masyarakat telah diterima oleh admin dan sampai sekarang terus meningkat. Admin BARUGA SULSEL bertanggung jawab untuk meneruskan dan memastikan status dan selesainya setiap laporan yang masuk ke setiap Organisasi Perangkat Daerah. Seiring berjalannya program ini, banyak masukan dari masyarakat untuk memperluas cakup BARUGA SULSEL, maka dari itu diluncurkanlah BARUGA SULSEL versi 2.0.



bab V

KESIMPULAN

LAPORAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2022

5.1. Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs melalui berbagai program. Sejumlah langkah yang telah ditempuh daerah sampai dengan akhir tahun 2022 antara lain: (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah secara *online*, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator TPB/SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan TPB/SDGs yang melibatkan *stakeholder* terkait, (iv) menyusun rencana aksi daerah terkait dengan implementasi TPB/SDGs di Sulawesi Selatan, dan (v) mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam document perencanaan daerah, serta (vi) memperkuat kolaborasi dengan NGO dalam mengakselerasi pencapaian target TPB/SDGs diberbagai tujuan. Pelaksanaan upaya pencapaian TPB/SDGs di Sulawesi selatan diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dari pemerintah untuk mencapai target pembangunan daerah, yang diupayakan dapat mencapai kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelum pandemic Covid-19.

Laporan tahunan ini menggambarkan sejauh mana perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs di Sulawesi selatan, yang merupakan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Kondisi capaian TPB/SDGs pada tahun 2022 sekitar 57% yang masih jauh dari harapan menjadi PR besar bagi pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait, dan diharapkan kondisi tersebut menjadi pemicu bagi seluruh pihak terkait untuk lebih adaptif dalam menghadapi setiap tantangan serta dapat lebih mendorong penciptaan inovasi sebagai langkah dalam upaya percepatan pencapaian TPB/ SDGs di Sulawesi selatan.

5.2. Tabel capaian Indikator TPB/SDGs tahun 2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN						
TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	8.78* (Maret)	9	8,63	●
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	92,97	99	100,00	●
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas kesehatan	47,12	71,51	49,43	●
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas sosial	7,40%	100	100%	●
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	365.669	349	364.414	●
TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	94.35 (95.44 BPS)	93	94,32	●
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas kesehatan	98,3	95		Data Tidak tersedia

1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	73.41 (59,66 BPS)	73,87	73,01	▼
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	91.18 (BPS)	100	91,96 (BPS)	▶
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	86,75	85,8	92,94 (BPS)	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan	22,79	PM	3,82 (BPS)	●
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	67.4 (60.35)	64,45	71,28	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	84.5 (91.47)	87,37	96,51	●
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	99,41	PM	97,36	▼
TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	"Meninggal 1 : 27 Terdampak : 21.470"		Meninggal : 32 Terdampak : 2,312	●
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	PM	32	

	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	PM	6	
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76	PM	46	
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.470	PM	2.312	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	23	23	●
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	100	100	100%	●
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	100	PM	100%	●
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154,87	152,55	150,07	●
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.458.523.000	PM	89.974.412.500	●
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN						
TARGETN 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	7,93	6,55	10,79 (BPS)	▼
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	19 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia)	18,5	21,7 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia)	▼

2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4,79	3,8	3,78 (BPS)	●
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	10,7*	7,71	Menunggu Rilis BPS	Data tidak tersedia
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas kesehatan	27,4 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia)	21,59	27,2 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia)	▶
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas kesehatan	Tidak Ada Survei	31,5	Tidak Ada Survei	Data tidak tersedia
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas kesehatan	6,2% (SSG I, Survei Status Gizi Indonesia)	7,5	8,3% (SSGI, Survei Status Gizi Indonesia)	▼
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas kesehatan	9,94	26,5	8,50	●
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas kesehatan	74,60	80	72,20	●
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	80,1	88,3	83,1	▶
	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	65,5	60,51	69,5	
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH						
TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya	Dinas kesehatan	95,04	97	94,8	▼

	ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas kesehatan	129/100.000 KH	91/100.000 KH	174 kasus	▼
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	94.35 (95.44 BPS)	93	94,32	●
<p>TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p>						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	6/1000 KH	5/1.000KH	1176 kasus	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	4/1000 KH	3/1.000KH	954 kasus	●
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	5/1000 KH	5/1.000KH	1117 kasus	●
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas kesehatan	91,67	95,5	100,00	●
<p>TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p>						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas kesehatan	0,11	< 1/1000 Penduduk	0,20	▼
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas kesehatan	0,028	< 0.5%	0,26 (RPD)	●
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas kesehatan	161/100.000 Penduduk	217/100.000 Penduduk	228/100.000 Penduduk	▼
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas kesehatan	21	5	22	●
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas kesehatan	100	100	100	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas kesehatan	51,114	81		Data Tidak Tersedia

				975		
3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas kesehatan	18	21	17	▼
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas kesehatan	0 Kab/Kota (Bukan Tahap Evaluasi/Survei)	4		Data Tidak Tersedia
TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas kesehatan	4.1 (20.47 BPS)	7,04	2,35	●
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas kesehatan	9,06	18,08	25,18	▼
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas kesehatan	2,33	10,11	3,40	●
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	24	24	24	●
TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan						
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN		1,91%		Data Tidak Tersedia
TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	73.41 (59.66 BPS)	74	73,01	▼
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas kesehatan	21,11	20	23,14	●
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A	27,4	16	29,50	▼
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A	2,29	2,15	2,22	▶

TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	4,22	PM	7,15(BPS)	●
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas kesehatan	8.484 Jiwa (786 Jiwa BPS)	950 Jiwa	920 Jiwa	▼
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas kesehatan	92.97 (76.39 BPS)	99%	97,03%	▼
TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	21.11 (20.47 BPS)	PM	29,04	▼
TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas kesehatan	90%	93%		Data Tidak Tersedia
TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas kesehatan	24/100.000 Penduduk	23/100.000 penduduk	23,97/100.000 Penduduk (RPD)	●
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS						
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	88,09	62,02	76,15	●
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan	90.05 (87.07)	83,31	101,02	●

4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	8,46	8,42	8,63	●
TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.						
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan	87,07	83,31	101,02	●
TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Informatika	94,10	PM	73,16 (BPS)	▶
			67,29	PM		
TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	97,03 (60,32 BPS)	89,23	99,67	●
TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan	92,48	96,21	93,31	▶
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan	99,78	PM	96,55	▶
			98,29	PM		
TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	54,15	SD = 57,16	49,77	▼

				SMP = 52.44		
				SMA = 83.77		
				SMK = 82.08		
				SLB = 59.54		
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER						
TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DP3A	8	7	7	●
TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3A	0,033	0,63	0,030	●
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DP3A	0,092	0,0007	0,11	▼
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DP3A	100	92	100	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3A	0,033	0,63	0,030	●
TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						

5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	DP3A	9,25	12,8	9,33 (BPS)	●
			NA	1,19		
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	DP3A	21,5	24	21,5	▼
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DP3A	27,4	16	29,50	▼
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan	87,07	83,31	101,02	●
TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	DP3A	25,88	16,72	25,88	●
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	DP3A	32,14	43,4	72*	●
TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DP3A	20	13,46	26,10	▼
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	69,13	78	71,10 (BPS)	▼

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK						
TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	91,18 (BPS)	86,28	91,96 (BPS)	●
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8,83	12	11.509	●
6.1.1.(C)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15,13	23,57	91,96	●
TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Perkimtan	89,08	PM	87,22 (BPS)	▶
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	91,57	91,02	92,24 (BPS)	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	3,047	3	3,047	●
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	2,863	2,250		Data Tidak Tersedia
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24,00	24	16	▼
TARGET 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						

6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15,00	18	16	▼
6.3.2.(a)	kualitas air danau	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	NA	3,57		Data Tidak Tersedia
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	NA	72,25		Data Tidak Tersedia
TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.						
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas kehutanan	2	4 RPDAST	4 RPDAST	●
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	21	16	●
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas kehutanan	175.507,49	110.425.79	196.745,33	●
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	?	11	4	4	●
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5,00	5	5	●
TARGET 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.						
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Dinas kehutanan	13.023	46	12.678,2	▼
6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata	Dinas kehutanan	2	2	2	

	airnya dan dipulihkan kesehatannya.					
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU						
TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	98,72 (97,24 BPS)	98,5	99,89	●
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		1.056,63	848,93	▼
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	91,67 (91,53 BPS)	93,4	93,38	▶
TARGET 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.						
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22	22,99	27,59	●
TARGET 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.						
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	14	NA	▼
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI						
TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	3,66 (7,15 BPS)	PM	4,11 (BPS)	●
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	RPJMD	56,81 (59,66 BPS)	62,43	39,12 (BPS)	▼
TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	46,27	45,60	35,17	▼
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	36,76	41,26	36,45	▼
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	33,24 (91,61 BPS)	84,93	93,33 (BPS)	●

8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	30,963792 78	30	39,22	●
TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam)	Tenaga kerja dan transmigrasi	19 217	PM	15196	▼
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	5,72	6,95	4,51 (BPS)	●
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	Tenaga kerja dan transmigrasi	7,42	PM	6,23 (BPS)	●
TARGET 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	23,78	40,91	22,61	▼
TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	1,20	1,02	1,32	●
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	8.591	94	70.997	▼
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	4.194.031	2.062.000	7.590.063	●
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	-	18,29	Tidak ada Survey	Data tidak tersedia
TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	30,41	31	35,76	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR						
TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Dinas perhubungan	42,7	89	116	●
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas perhubungan	1	5	2	▶
TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas Perindustrian	12,47 (12,5 BPS)	4	13,42 (BPS)	●
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindustrian	-0,27 (3,02 BPS)	5	9,86 (BPS)	●
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	16,35 (8,47 BPS)	8,92	15,45	●
TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas perindustrian	8,91	52	65	●
TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.						
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	3,88	6	7,85	●
TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Diskominfo		70		Data Tidak Tersedia
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	86,75 (69,13 BPS)	78	71,10 (BPS)	▶
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	59,69 (OPD) (BPS)	58	64,14	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN						
TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	0,382	0,398	0,377	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	8,53	9	8,63	●
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	-	0	●
TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		PM	83,39	Data Tidak Tersedia
TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	47,12	71,51	49,43	▶
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN						
TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertahanan	69,11	PM	69,90 (BPS)	●
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,00	1	1,00	●
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10,00	PM	10,00	●
TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas						

jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Perhubungan		30,80	7,83	▶
------------	--	-------------	--	-------	------	---

TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3,00	PM	3,00	●
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,00	PM	1,00	●
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappelitbangda	NA	PM	21	●

TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2,00	PM	2,00	●
------------	---	-------------------------------------	------	----	------	---

TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	"Meninggal : 27 Terdampak : 21.470"		Meninggal : 32 Terdampak : 2312	●
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	PM	32	
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	PM	6	
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76	PM	46	

	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.470	PM	2.312	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154,87	152,55	150,07	●
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	8		Data Tidak Tersedia (Pindah Kewenangan)
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	5		Data Tidak Tersedia
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.458.623.000	PM	89.974.412.500	●
<p>TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.</p>						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	●
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	82,32	73	54,48	▼
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
Tujuan 12						
<p>TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p>						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	589007,56 Ton	4.589.838.184 Ton	5.557.493.578	●
<p>TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</p>						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	31,82 Ton/Hari	45.55 Ton/Hari	174,375	●


Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
Tujuan 13						
TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	●
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	"Meninggal : 27 Terdampak : 21.470"		Meninggal : 32 Terdampak : 2,312	●
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	PM	32	
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	PM	6	
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76	PM	46	
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.470	PM	2.312	
TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappelitbangda	1	-	1	●
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN						
TARGET 14. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas kelautan dan perikanan	63,87	88,73	94,01	●
TARGET 14. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.						

14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas kelautan dan perikanan	-	-	-	Data Tidak Tersedia
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas kelautan dan perikanan	19	19	19	●
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas kelautan dan perikanan	660	12	0	▼
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaian	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN						
TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas kehutanan	NA	56,64	-	Data Tidak Tersedia (Pindah Kewenangan)
TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.						
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Dinas kehutanan	NA	100	55,46	▼
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas kehutanan	-	12.000 Ha	-	Data Tidak Tersedia (Pindah Kewenangan)
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas kehutanan	16	16	24	●
TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.						
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas kehutanan	0,73	0,99	0,71	▼
TARGET 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						

15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak	1 Dokumen	●
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Capaiam	Status Capaian
			2021	2022	2022	
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH						
TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	44	PM	-	Data tidak tersedia
		POLDA		52		
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS		PM	-	Data tidak tersedia
		POLDA		92		
TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.						
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP3A	0,091	2	0,11	●
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3A	0,038	0,00078	0,020	●
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3A	NA	0,025	NA	Data tidak tersedia
TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BKAD	99,49	96	98,62	●
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	BKAD	WTP	100	WTP	●

	(Provinsi/Kabupaten/ Kota).					
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	4,01 (A-)	PM	4,34 (A-)	●
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	63,02 (B)	80.00(A)	68,08 (B)	▶
				20		
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	28,33	100	28.33 *	▶
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	60,07 (B)	78.00 (BB)	66,16 (B)	●
TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS		PM		Data Tidak Tersedia (Berubah cara hitung)
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		PM		Data Tidak Tersedia (Berubah cara hitung)
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS		PM		Data Tidak Tersedia (Berubah cara hitung)
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran	Disdukcapil	89,00	PM	89,35 (BPS)	●
	Target/Indikator	Sumber Data	Baseline	Target	Target	

Kode Indikator			2021	2022	Capaian	Status Capaian
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan pendapatan daerah	0,00	0,79	0,80	●
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan pendapatan daerah	0,00	0,71	0,71	●
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan pendapatan daerah	45,57	40,43	65,08	●
TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika		70		Data tidak tersedia
TARGET 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	87,17 (OPD) (59.69 BPS)	62	64,14	●
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		100		Data Tidak Tersedia
TARGET 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS		PM	92,01	●
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	98,72	PM	98,8	

17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	75	PM		Data Tidak Tersedia
TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ada	Ada	Ada	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	109.937,00	PM		Data Tidak Tersedia
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	96,3	PM	98,8	



Laporan SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2022

BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jalan Jend. Sumoharjo, No 269, Makassar